

Membangun Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi
Dalam Ekosistem Mangrove di Sulawesi Selatan

PEREMPUAN PEREMPUAN PESISIR

PROGRAM RESTORING COASTAL LIVELIHOOD
PROVINSI SULAWESI SELATAN
2015



Membangun Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi
Dalam Ekosistem Mangrove di Sulawesi Selatan

PEREMPUAN PEREMPUAN PESISIR

PROGRAM RESTORING COASTAL LIVELIHOOD
PROVINSI SULAWESI SELATAN
2015

PEREMPUAN - PEREMPUAN PESISIR

Edisi Pertama
August, 2015

Buku ini merupakan salah satu model pembelajaran kelompok perempuan pesisir binaan Program RCL - Oxfam tahun 2010 - 2015 dalam upaya membangun ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi dalam wilayah pesisir di Sulawesi Selatan.

Restoring Coastal Livelihood Team :
Jaya Tulha (Project Manager)
Nurhasdiana (Gender Officer)
Tua Hasiholan Hutabarat (Project Officer)
Lukas Merapi (Project Officer)
Fatmasari Hutagalung (Project Officer)
Tyas (Monitoring, Evaluation, and Learning Officer)
Alauddin Latief (Media Communication Officer)

OXFAM

Jl. Ketilang No. 10 Makassar - 90125
Telp. 0411 858468 Fax 0411 873180
Info : makassar@oxfam.org.uk
www.rcl.or.id



Canada



In partnership with:



CONTENTS

Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
I. GAMBARAN UMUM KEHIDUPAN MASYARAKAT PESISIR DI SULAWESI SELATAN	1
A. Pendahuluan	2
B. Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir	11
II. BELAJAR DARI PENGALAMAN PEREMPUAN	19
III. OXFAM DAN RESTORASI PENGHIDUPAN MASYARAKAT PESISIR	29
A. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	30
B. Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pesisir	37
C. Penyaluran Bantuan Melalui Kupon Komunitas	48
D. Tantangan Dalam Upaya Menguatkan Kelompok Usaha Perempuan	50
E. Melatih Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Yang Partisipatif dan Responsif Gender	53
F. Kerusakan dan Upaya Perbaikan Ekosistem Pesisir	55
G. Peran Sosial Perempuan Dan Laki-laki	59
H. Memperkuat Organisasi Masyarakat Pesisir	66
I. Mendorong Kesenjangan dan Keadilan Gender	69
IV. Belajar Dari Teori Ke Praktek : Menghapuskan Ketidakadilan Bagi Perempuan	75
V. Penutup	81

KATA PENGANTAR

Masyarakat pesisir Sulawesi Selatan dalam keseharian sangat bergantung pada sumber daya alam pesisir yang tersedia. Laut yang luas memberikan harapan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Perubahan musim dan angin sangat menentukan mereka untuk mengarungi laut lepas.

Selama musim barat yang ditandai dengan angin kencang, nelayan pada umumnya jarang melaut. Penghasilan dari hasil laut pada musim barat turun drastis, bahkan kadangkala tidak ada pemasukan apapun. Hal lain yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat pesisir adalah kerusakan ekosistem pesisir.

Dampak kerusakan ekosistem pesisir menjadi persoalan yang kompleks bagi masyarakat. Kehidupan masyarakat pesisir semakin sulit. Sumber daya alam pesisir mengalami kerusakan terus menerus yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dalam pengelolaan ekosistem pesisir

Akibatnya, terjadilah tekanan-tekanan sosial ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait dan harus dihadapi oleh masyarakat. Ketidakmudahan dalam mengatasi faktor-faktor yang kompleks tersebut menjadi tantangan dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat pesisir. Diperlukan pendekatan secara menyeluruh untuk mengurai faktor – faktor dan persoalan yang kompleks agar kemiskinan dan kesenjangan ekonomi bisa diatasi secara efektif dan efisien

Guncangan juga dialami oleh perempuan yang disebabkan perubahan ekologi pesisir yang berdampak pada kesulitan masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktifnya. Seperti yang dituturkan oleh seorang ibu pada diskusi terbatas bahwa dahulunya mereka masih bisa mencari udang di kaki bakau dan kayu bakar untuk memasak dari ranting-ranting pohon. Kini udang, ikan, kerang dan ranting kayu untuk keperluan sehari-hari sudah sangat sulit untuk didapat. Biasanya bila hasil tangkapan udang dan kerang banyak, sisanya masih bisa dijual dan mendatangkan keuntungan tambahan untuk menopang hidup keluarga.

Berbagai program pembangunan untuk membantu mengatasi kesulitan kehidupan masyarakat pesisir telah digulirkan oleh pemerintah. Namun hasil yang dicapai dengan biaya yang telah dikeluarkan dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya belum membawa hasil yang memuaskan.

Untuk membantu masyarakat pesisir, khususnya perempuan rentan agar bisa keluar dari persoalannya, OXFAM dan mitranya (YKL, MAP) melaksanakan Program Restoring Coastal Livelihood (RCL) yang didukung oleh Pemerintah Kanada selama lima tahun.

Program RCL atau Restorasi Penghidupan Masyarakat Pesisir melakukan serangkaian kegiatan pendampingan, pelatihan, peningkatan kapasitas, lokakarya dan partisipasi masyarakat yang berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat pesisir.

Isi dari buku ini adalah rangkaian cerita dari kebiasaan perempuan pesisir di lokasi program, yang dapat dijadikan pembelajaran baik itu oleh masyarakat ataupun lembaga/instansi yang melaksanakan kegiatan yang sama.

Program RCL bertumpu *bottom up planning* yang berarti masyarakat lebih berperan dalam mengusulkan dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, serta program yang bersifat *collaborative* atau bekerjasama mempengaruhi pihak lain untuk mendukung program RCL.

Dalam hal ini peran OXFAM dan mitranya hanya sebatas mendampingi, memotivasi, memfasilitasi dan memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat pesisir melalui kerjasama multi pihak dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta.

Masyarakat diharapkan mampu melakukan kerjasama dan mempengaruhi pihak lain untuk mendukung pemenuhan hak-hak masyarakat pesisir terutama masyarakat rentan, khususnya perempuan. Usaha untuk mendorong perkembangan masyarakat perlu terus dilakukan agar tercipta kemandirian masyarakat. Dengan mendorong kemandirian masyarakat maka pembangunan tidak

mulai dari titik nadir, tetapi berawal dari sesuatu yang sudah ada pada masyarakat pesisir.

Oleh karena itu, terbitnya buku ini diharapkan bermanfaat dan bermakna bagi multi pihak yang menaruh perhatian terhadap Penghidupan Masyarakat Pesisir untuk membangun kedayatahan masyarakat pesisir dalam menghadapi guncangan perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan di wilayah pesisir.

Tulisan dalam buku ini mengulas beberapa strategi yang telah dilakukan oleh OXFAM bersama mitranya dalam praktek pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah barat Sulawesi Selatan.

Tidak ada gading yang tak retak, tulisan ini tentunya tidaklah sempurna, namun kami yakin ada nilai positif yang dapat dipetik dan dipelajari bersama untuk menyelami Penghidupan Masyarakat Pesisir.

Selamat membaca dan menikmati tulisan ini, semoga bermanfaat.

Makassar, 2015

Jaya Tulha

Program Manager RCL

Oxfam Eastern Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memperkuat kelompok masyarakat pesisir dan kepemimpinan perempuan dengan mengorganisir dan memberikan pelatihan, pendampingan kelompok, bantuan alat kerja, bimbingan teknis terkait dengan pemasaran dan keuangan kelompok bagi mereka adalah hal penting untuk dilakukan dan diharapkan.

Seperangkat kegiatan yang direncanakan bersama dengan masyarakat diharapkan ke depannya mereka akan memiliki keahlian hidup, perspektif gender, dan kepemimpinan yang kuat.

Kelompok masyarakat yang kuat serta pemimpin perempuan ditengah masyarakat inilah yang kemudian akan menginisiasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang mensejahterakan perempuan, pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan serta penciptaan pasar yang adil bagi perempuan dan kelompok miskin, serta mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang sensitif gender dan pro poor.

Agar masyarakat kuat maka penting juga pada saat yang bersamaan kapasitas pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten pun harus ditingkatkan dalam menyusun kebijakan dan anggaran yang sensitif gender dan pro poor.

Peningkatan kapasitas ini akan membantu pemerintah desa sampai kabupaten membuat kebijakan-kebijakan yang memastikan perempuan dan orang miskin dapat berpartisipasi dan menikmati program-program pemerintah termasuk dalam hal pengelolaan sumberdaya pesisir.

Penguatan kelompok dan kepemimpinan perempuan serta kapasitas pemerintah tidak akan berarti banyak jika program-program yang dijalankan oleh pemerintah tidak terkoneksi dengan kebutuhan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat (perempuan dan laki-laki), pemerintah kabupaten dan OXFAM adalah salah satu strategi yang penting dilakukan agar program-program yang dibuat oleh institusi yang berbeda ini bisa saling menguatkan dan tidak tumpang tindih.

Program Penghidupan Masyarakat Pesisir tidak dimaksudkan untuk menciptakan ketergantungan. OXFAM dan mitranya bermaksud agar masyarakat pesisir mempunyai kedayatahan terhadap goncangan sosial, ekonomi dan ekologi yang terjadi di wilayah pesisir serta bisa melakukan pengelolaan sumber daya alam pesisir secara berkelanjutan.

Mengakses sumber daya alam pesisir tanpa mengeksploitasinya adalah cara bijak untuk melestarikan lingkungan pesisir untuk jangka panjang karena alam memiliki potensi yang berlimpah untuk kelangsungan hidup manusia.

Merusak sumber daya alam pesisir pada hari ini berarti akan menciptakan bencana pada masa yang akan datang. Dengan memelihara sumber daya alam pesisir pada hari ini berarti akan menciptakan kehidupan yang lebih lestari untuk masa depan dan dapat diwariskan bagi anak cucu.

1

GAMBARAN UMUM KEHIDUPAN MASYARAKAT PESISIR DI SULAWESI SELATAN

A. PENDAHULUAN

Kontribusi Perikanan dan Kelautan Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir

Jumlah pulau di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 295 buah terdiri dari pulau yang telah bernama sebanyak 190 buah, dan pulau belum bernama sebanyak 105 buah. Bila diperhatikan lagi secara nasional Indonesia memiliki luas daerah perairan seluas 5.800.000 km², dimana angka tersebut adalah empat kali dari luas daratannya.

Dengan luas daerah perairan tersebut wajar jika bangsa Indonesia menjadikan laut sebagai basis kekuatan di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi. Hal ini diperkuat berdasarkan data yang didapat dari BPS kontribusi sektor perikanan Indonesia yang terus meningkat dari tahun 2007 hingga 2010 (BPS, 2011)

Produk Domestik Bruto (PDB) Berdasarkan Harga Berlaku Dan Persentase PDB Perikanan Tahun 2007 – 2010 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun			
	2007	2008	2009	2010
Berdasarkan Harga Berlaku				
Perikanan	97.697,30	137.249,50	176.620,00	199.219,00
PDB Total	3.950.893,20	4.948.688,40	5.603.871,20	6.422.928,30
PDB Tanpa Migas	3.534.406,50	4.427.633,50	5.138.955,20	5.924.008,20
Persentase PDB Perikanan				
Terhadap PDB Total	2,47	2,77	3,15	3,10
PDB Tanpa Migas	2,76	3,10	3,44	3,36

(Sumber BPS 2012)

Berdasarkan Tabel 1.1 pada tahun 2007 sektor perikanan menyumbang PDB sebesar 97.697,30 Miliar Rupiah dari total PDB

3.950.893,20 Miliar Rupiah atau sekitar 2,47%. Angka tersebut terus meningkat di tahun berikutnya hingga mencapai angka 3,10 persen terhadap PDB total pada tahun 2010.

Khusus di sektor perikanan, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa garapan dari perikanan laut, darat dan umum. Sektor ini telah berkembang dengan komoditi perikanan ikan tuna segar dan beku, ikan kerapu, ikan kakap dan rumput laut.

Khusus untuk rumput laut, saat ini Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sentral pengembangan produksi rumput laut di Indonesia, khususnya untuk jenis *glacillaria* dan *E Cottoni*, masing masing memberikan kontribusi 58% dan 36% terhadap produk rumput laut nasional

Dengan sumber daya laut dan perikanan yang begitu kaya seharusnya masyarakat pesisir dan kepulauan mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih bagus lagi. Namun kenyataannya tidaklah seperti yang dibayangkan, masyarakat pesisir justru mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Perempuan memainkan peran yang besar dalam kegiatan ekonomi pesisir, menghabiskan waktu yang cukup banyak karena mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengikat rumput laut pada musim tertentu, atau jenis pekerjaan lain di wilayah pesisir. Walaupun perempuan bekerja lebih banyak menghabiskan waktu namun mereka mendapatkan hasil yang sedikit dibandingkan laki-laki. Kepemilikan aset seperti lahan dan sumber daya pesisir lainnya lebih banyak dikuasai/dikontrol oleh laki-laki dibandingkan oleh perempuan

Mereka berada dalam kesulitan ekonomi atau hidup dalam garis kemiskinan di tengah sumber daya alam pesisir yang berlimpah ruah. Coba diperhatikan sederet hulu persoalan menyebabkan identiknya kemiskinan pada kehidupan di muara, yakni masyarakat pesisir. Mulai dari berkurangnya mangrove karena intensnya pembuatan tambak —yang kemudian memengaruhi ekosistem pesisir, sampai pada kebudayaan patron-klien yang disebut-sebut sebagai sebuah bentuk persoalan yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan di dalam ranah sosial.

Indonesia memiliki potensi dan luasan ekosistem mangrove yang cukup luas, dari sekitar 15.900 juta ha ekosistem mangrove yang terdapat di dunia, sekitar 27% atau 4.293 juta ha berada di Indonesia. Luas ekosistem mangrove tersebut terus mengalami penurunan, secara statistik diprediksi dari tahun 1993 hingga tahun 2011 menunjukkan bahwa ekosistem mangrove telah mengalami degradasi sekitar 46.887 ha/tahun atau 843.966 ha. Sementara upaya pemulihan melalui rehabilitasi diprediksi dari tahun 1999 hingga tahun 2011 telah mengembalikan luas ekosistem mangrove sekitar 1.972 ha/tahun atau 15.780, sehingga luas ekosistem mangrove hingga tahun 2011 diperkirakan sekitar 3.422.825 ha.¹

Departemen Kelautan dan Perikanan menyebut 60 persen dari penduduk miskin Indonesia merupakan masyarakat di wilayah pesisir.² Pada tahun 2011, terdapat 10.630 desa berciri pantai dan pesisir di Indonesia yang dihuni penduduk sekitar 7,8 juta jiwa dengan penghasilan kurang dari \$ 1 AS per hari.³

Sulawesi Selatan sendiri memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Pada tahun 2009, provinsi berpenduduk lebih dari 7,9 juta jiwa ini menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), salah satu indikator kemajuan ekonomi daerah, sekitar Rp 99.904,66 miliar. Dari nilai ini, sektor perikanan menyumbangkan Rp 7.017,10 miliar.

Namun angka ini tidak dapat menjadi ukuran tingkat kemakmuran masyarakat. Terbukti, pada tahun yang sama, penduduk miskin Sulsel masih berkisar 12,3 persen (BPS- 2009) dan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2009 mencapai 9.76 persen (BPS, 2010).

Wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan umumnya bersistem energi rendah. Sistem seperti ini memungkinkan hutan bakau sebagai salah satu jenis ekosistem yang menonjol. Tumbuhan jenis ini bertumbuh subur lantaran lebih stabil karena terlindung dari angin, gelombang,

- 1 Prof.DR.Amran Saru, ST, MSi, Membangun Sumber Daya Kelautan, Kontribusi Ekosistem Mangrove Dalam Meningkatkan Potensi Sumber Daya Perikanan Pesisir dan Laut secara Berkelanjutan, Juli 2013, hlm 61
- 2 Dalam The Indonesian Institute & Oxfam GB Makassar, *Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Kecamatan dan Desa di Wilayah Pesisir Sulawesi Selatan, Indonesia*, 2011, hl. 7.
- 3 *Bakti News* dalam Darmawan Salman, *Sosiologi Desa: Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas*, Ininnawa-ISPEI, Makassar, 2012, hl. 88.

dan arus air laut yang mungkin bisa mengganggu pertumbuhan bibit dan ketahanan pohon.⁴

Sayangnya, dua dasawarsa terakhir, tumbuhan ini menghilang lantaran dibabat untuk keperluan pembuatan tambak. Kencenderungan itu terjadi karena permintaan kayu bakau untuk memasok permintaan kota.⁵ Tidaklah mengherankan jika pada awal dasawarsa 1980-an, hutan bakau Sulawesi Selatan yang pernah mencapai 214.000 ha menyempit menjadi 23.000 ha saja pada 1991, sekitar 61 persen karena pembuatan tambak udang.⁶

Data dan fakta itu jelas sebuah kerugian besar bagi masyarakat pesisir. Pasalnya, orientasi budidaya ikan dan udang yang ada mengejar keuntungan jangka pendek. Berdasarkan data MAP (*Mangrove Action Project*) 2006, rentang usia tambak udang intensif di Indonesia hanya dua tahun. Setelahnya, tidak layak produksi lagi karena polusi sedimen akibat penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida ikan secara berlebihan.

Yang lebih memiriskan tatkala tambak-tambak tidak produktif itu ditinggalkan dengan pematang dan pintu air yang utuh. Nelayan setempat enggan menggarapnya lantaran tidak jelasnya siapa gerangan pemilik dan pihak mana saja yang berhak menggarapnya kembali. Pada kondisi seperti ini, keadaan tambak terlantar yang demikian makin memperparah kerusakan lingkungan. Tanah terpapar oksidasi dan cenderung asam karena tidak mengalami genangan pasang surut alami.

Tingkat Kesehatan, Pendidikan Masyarakat dan Isu Gender Sebagai Bagian Persoalan di Pesisir dan Pulau

Pemberdayaan masyarakat pesisir selama ini coba dilakukan oleh banyak elemen pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan. Sumber kemiskinan datang dari arah manapun yang melilit kehidupan saudara-saudara kita di pesisir dan kepulauan termasuk tingkat kesehatannya. Tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja OXFAM termasuk

4 Tim Oxfam, *Restorasi Penghidupan Pesisir: Membangun Ketahanan Sosial dan Ekologis dalam Ekosistem Bakau di Sulawesi Selatan*, Juni 2010, hl. 5.

5 Wawancara dengan Abdul Haris (46), warga Lakkang, Kecamatan Tallo, Makassar, pada November 2012.

6 Tim Oxfam, *Op.Cit.*, hl. 7.

rendah terindikasi dari rendahnya akses penduduk atas air bersih dan sanitasi serta tingginya angka buta huruf.

Kurangnya akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat adalah sebuah pertanda bahwa nasib masyarakat berada dalam situasi yang sangat buruk. Anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya disebabkan karena ketiadaan gedung sekolah yang mencukupi untuk menampung peserta didik, ketiadaan atau kurangnya guru mengajar khususnya guru-guru yang biasanya ditugaskan di daerah terpencil seperti di pulau sering tidak berada di desa untuk mengajar, ketiadaan buku dan sebagainya.

Menurut salah seorang murid setiap harinya dia pergi ke sekolah berharap akan mendapatkan pengetahuan tetapi ketika sampai di sekolah dia dan teman-temannya kecewa karena guru tidak ada kemudian yang guru honor menggantikan tugas. Terlebih bagi mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil kehidupan jauh lebih menyedihkan, ada sekolah namun tidak bisa belajar karena sebagian guru bertempat tinggal di daratan

Begitu juga dengan kondisi kesehatan masyarakat, di beberapa desa warga masyarakat kesulitan ketika hendak memeriksakan kesehatannya tidak ada tenaga medis terkadang mereka memutuskan harus pergi ke ibu kota Kabupaten untuk berobat. Biaya kesehatan akhirnya menjadi mahal bagi masyarakat karena jarak yang harus di tempuh ke ibu kota Kabupaten teramat jauh, banyak waktu yang dihabiskan serta ongkos transportasi yang tidak sedikit.

Masyarakat terpaksa harus menunda untuk berobat disebabkan harus menyeberang laut mana kalau iklim laut seperti angin kencang tidak bersahabat. Terkadang ada yang meninggal di tengah perjalanan karena lamanya penanganan yang harus diperoleh oleh pasien, ibu yang akan melahirkan dalam keadaan sakit harus menempuh perjalanan jauh guna mendapatkan pertolongan persalinan. Kondisi seperti ini sudah lama berlangsung hingga kinipun masih berlangsung, masyarakat masih berharap dan terus berharap agar mereka bisa memperoleh hidup lebih layak.

Tabel 1. memperlihatkan akses terhadap air bersih masih rendah, masih sangat sedikit masyarakat yang bisa mendapatkan

akses air bersih. Demikian pula dengan akses sanitasi yang kurang sekali dari standar kesehatan, bila kita berjalan-jalan memasuki desa atau dusun terlihat air kotor bergenang di sana sini serta sampah berserakan yang mengundang penyakit untuk mudah datang. Walau ada drainase di beberapa desa yang dibangun oleh pemerintah melalui PNPM namun selokan itu juga dipenuhi oleh sampah yang terlihat kurang disentuh atau dibersihkan oleh warganya.

Tabel 1 juga memperlihatkan angka buta huruf yang relatif tinggi dialami oleh masyarakat, dapat kita bayangkan akan seperti apa situasi dan kondisi masyarakatnya di masa yang akan datang. Tentunya mereka akan menghadapi tantangan yang sangat sulit karena kapasitas yang dimiliki pada hari ini tidak mampu menghadapi perubahan zaman dan waktu.

Tabel 1. Kondisi kesehatan masyarakat di 4 kabupaten

Kabupaten	Akses air bersih		Akses sanitasi		Tingkat buta huruf
	Kurang	baik	kurang	baik	
Takalar	47.7	52.3	60.0	40.0	18.73
Maros	40.0	60.0	60.8	39.2	15.33
Pangkajene	40.2	59.8	60.4	39.6	11.32
Barro	53.8	46.2	49.5	50.5	12.60
Sulsel	38.7	61.3	55.2	44.8	12.28
Indonesia	42.3	57.7	57.0	43.0	5.3

Sumber: diramu dari berbagai bahan 2009-2010 (termasuk Riskesdas, BPS, dan berbagai artikel, 2010)

Melalui berbagai data yang tersedia selama ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari mereka yang miskin di keempat kabupaten tersebut adalah perempuan. Kesimpulan ini ditarik dari data nasional yang memperlihatkan bahwa Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan tingkat buta huruf perempuan dan kematian ibu melahirkan yang tinggi serta tingkat pemberdayaan perempuan yang rendah dibandingkan nasional. Lihat table 2.

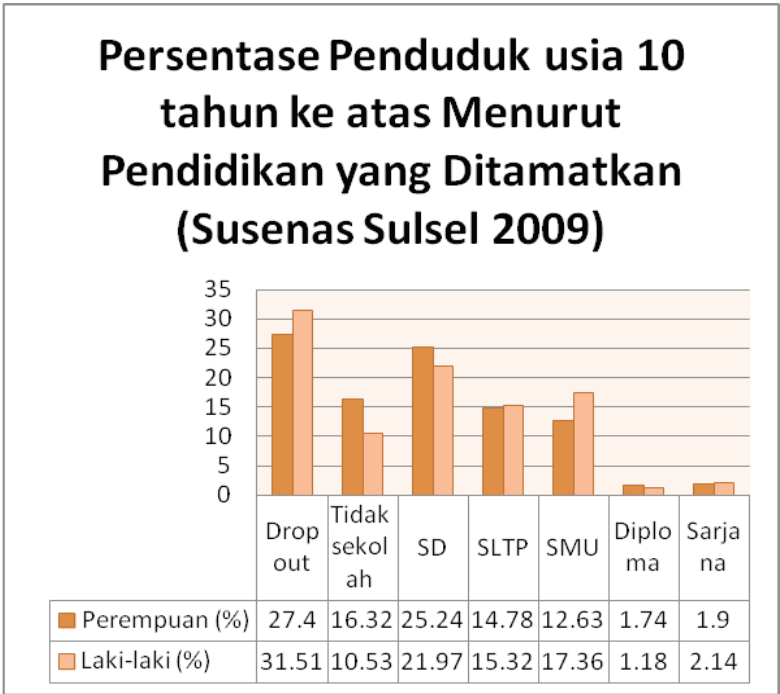
Tabel 2. Situasi dan Kondisi Perempuan di Sulawesi Selatan

Province	Poor People in 2009 (%) (based on TNP2K 2010)	Women's Illiteracy Rate (based on SUSENAS 2008)	Maternal Mortality Rate/1,000 Live Births (based on Statistics 2004)	Gender Empowerment Measure (based on Statistics 2002)
Sulawesi Selatan	12.31	1.68	1.24	56.9
National	14.15	0.62	1.11	59.2

Sumber: diramu dari berbagai dokumen, 2010.

Pada tabel dibawah ini bisa dilihat situasi pendidikan menurut data Susenas Sulsel 2009, angka drop out laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, tingkat pendidikan anak perempuan hingga SD lebih tinggi dibanding anak laki-laki. Selanjutnya jumlah anak laki-laki SMP hingga Sarjana lebih banyak dibandingkan anak perempuan yang persentasenya pendidikannya

mengalami penurunan drastis bila diperhatikan dari Usia sekolah SD ke SMP dan seterusnya.



Dari hasil penilaian gender yang dilakukan oleh Kapal Perempuan bekerja sama dengan Oxfam pada tahun 2011 secara keseluruhan memperlihatkan tingkat pemberdayaan perempuan masih rendah ditandai dengan berbagai persoalan yang dihadapi sebagai berikut:

- a). Isu-isu ketidakadilan gender banyak terjadi karena terkait erat dengan keyakinan dalam beragama dan kepercayaan terhadap adat. Adanya poligami, sunat perempuan, perkawinan dini, beban ganda perempuan, rendahnya pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan, rendahnya partisipasi perempuan, rendahnya upah perempuan dan rendahnya kepemimpinan perempuan merupakan dampak dari kuatnya kepercayaan terhadap penafsiran agama khususnya laki-laki adalah pemimpin dan perempuan adalah ibu rumah tangga. Dalam tata

pemerintahan, pelanggaran isu-isu ketidakadilan gender ini juga terjadi misalnya melalui proses-proses pengambilan keputusan di desa yang lebih mengutamakan partisipasi laki-laki dibanding perempuan. Dalam konteks perencanaan pembangunan desa, isu-isu perempuan seperti pemenuhan hak dasar perempuan tidak menjadi prioritas. Pembangunan fisik dan produksi yang ditangani laki-laki menjadi isu yang diutamakan.

- b). Hasil pemetaan situasi dan kondisi perempuan dengan menggunakan alat kerangka pemberdayaan perempuan (KPP) menunjukkan rendahnya 5 aspek kehidupan perempuan. Hal ini dapat ditemukan dari tingkat kesejahteraan yang rendah, akses rendah, partisipasi rendah dan kontrol rendah. Penyebab utama dari kelima aspek ini juga terkait erat dengan pandangan-pandangan yang patriarkis yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dalam praktek-praktek beragama, budaya dan dalam sistem pemerintahan.
- c). Pada umumnya isu-isu ketidakadilan gender tersebut tidak dapat digali secara mendalam disebabkan beberapa alasan diantaranya (1) perempuan masih menganggap bahwa situasi keseharian mereka merupakan hal yang wajar diterima bahkan merupakan takdir karena dalam ajaran agama perempuan harus taat pada suami; (2) sebagian besar masyarakat terutama tokoh masyarakat, tokoh adat laki-laki hanya memberikan penjelasan-penjelasan normatif misalnya tidak ada KDRT, tidak ada ibu meninggal karena melahirkan, tidak ada perkawinan dini, tidak ada buta huruf dan lain-lain. Tampaknya mereka hendak memberi kesan bahwa masyarakat di wilayahnya sudah cukup maju dan memiliki kesadaran tinggi. Disisi lain, jawaban para tokoh ini juga terkesan adanya upaya untuk melegitimasi bahwa dengan melakukan praktek beragama dan berpegang teguh pada adat yang ada akan menjamin kehidupan masyarakat terhindar dari masalah-masalah tersebut

B, SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

PEMANFAATAN daerah pesisir dan pulau-pulau kecil masih belum optimal karena perhatian kebijakan pemerintah selama ini lebih banyak berorientasi ke daerah daratan.

Umumnya wilayah pesisir selama ini digunakan sebagai wadah manusia untuk menjalankan berbagai kegiatannya mulai dari tempat tinggal, pertanian, pertambakan, pelabuhan, kawasan industri, pariwisata, rekreasi dan lain sebagainya, pembangkit tenaga listrik, dan konservasi sumber daya alam. Sedangkan di pantainya manusia melakukan kegiatan penangkapan ikan, penanaman rumput laut, pelayaran dan sebagainya.

Kegiatan yang banyak itu terkadang saling menguntungkan namun tidak jarang pula saling berbenturan kepentingannya. Misalnya jika lautan itu telah dijadikan bentangan rumput laut pasti tidak bisa digunakan untuk jalur keluar masuknya kapal baik kecil maupun besar karena akan merusak bentangan rumput laut yang sedang di tanam itu. Yang lain lagi tentu masyarakat sangat membutuhkan jasa pelayaran kapal untuk mengirimkan hasil-hasil laut dan sebagainya yang penting untuk menunjang perekonomian masyarakat.

Untuk menghindari konflik dan benturan kepentingan diantara para pihak yang memiliki kepentingan di pesisir maka penting diatur pengelolaan pesisir dan sumber daya alam yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat bersama.

Begitulah pentingnya wilayah pantai dan pesisir memiliki arti yang strategis karena merupakan wilayah interaksi atau peralihan (interface) antara ekosistem darat dan laut yang memiliki sifat dan cirinya tersendiri. Kehidupan masyarakat pesisir di wilayah manapun di Indonesia hampir sama tingkat kesejahteraannya, untuk memperoleh sumber penghidupan mereka sangat tergantung sekali pada sumber daya alam pesisir.

Nelayan khususnya pada musim-musim tertentu mereka akan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak dari hari-hari lainnya begitu juga terkadang mereka hanya memperoleh cukup untuk dimakan saja. Lebih buruk lagi mungkin tidak mendapat

apapun karena saat itu cuaca di laut sangat buruk sehingga nelayan tidak berani berlayar untuk mencari ikan.

Dalam kalender musim biasanya ada musim baik dan buruk dimana hasil tangkapan banyak ketika musim baik. Nelayan harus melakukan pekerjaan lain karena terkendala cuaca buruk karena tidak bisa melaut. Pekerjaan lain atau alternatif pada cuaca buruk harus dilakukan untuk melanjutkan kehidupan.

Bagi yang punya lahan sawah pada musim penghujan masyarakat akan menanam sawahnya, masyarakat yang tidak punya lahan biasanya bekerja pada pemilik tanah, mulai dari mengolah tanah, menanam bibit, memupuki padi, hingga memanennya.

Ada juga sebagian masyarakat lainnya ada musim-musim dimana mereka menanam rumput laut khususnya pada musim hujan (November-Maret) karena pada musim kemarau rumput laut mudah terserang hama karena air laut panas dan tidak tumbuh dengan baik.

Jenis rumput laut sakul atau yang lebih di kenal “gulung-gulung” oleh masyarakat Takalar adalah jenis rumput laut yang bisa ditanam pada musim kemarau, jenis ini akan ditanam di daerah teluk yang ombaknya bagus. Saat musim kemarau, mereka menangkap kepiting, mencari lawi-lawi (kerang), dan yabo-yabo (sisa rumput laut) yang kemudian dikumpulkan dan dijual ke pengumpul di desa. Pekerjaan sebagai petani rumput laut mendatangkan keuntungan yang lebih banyak, apalagi jika petani memiliki bentangan yang banyak maka dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak.

Berdasarkan data DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) RI tahun 2008, apabila seluruh lahan dapat dimanfaatkan maka akan diperoleh kurang lebih 32 juta ton per tahun. Apabila harga rumput laut kering minimal sebesar Rp 4,5 juta per ton, maka penerimaan yang diperoleh berkisar Rp 144 triliun per tahun.

Potensi rumput laut Indonesia dapat menjadi salah satu sumber pemasukan bagi devisa negara, dan juga mampu menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor rumput laut terbesar dunia. Sejak tahun 2008, Indonesia telah menjadi eksportir rumput laut kering tropis terbesar sedunia.

Pengembangan budidaya rumput laut di Sulawesi Selatan memberikan prospek yang menjanjikan. Panjang garis pantainya mencapai 1.937 km. Luas lahan budidaya laut Sulawesi Selatan mencapai 193.700 ha dan sekitar 10 persennya dimanfaatkan untuk pengembangan rumput laut *Kappaphycus alvarezii* atau katoni, sedangkan lahan budidaya tambak untuk budidaya rumput laut jenis *Gracilaria sp* atau sango – sango sekitar 32.000 ha.

Para petani rumput laut yang berada di Kepulauan Tanakeke dan Takalar Daratan (seperti di desa Putondo) sangat aktif melakukan melakukan penanaman dan perawatan rumput laut secara reguler, kegiatan perawatan ini penting dilakukan agar hasil panen nanti lebih bagus dan banyak. Pekerjaan ini biasanya bisa dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-laki, pada lokasi lain ada juga rumput laut setelah ditanam kemudian tidak dilakukan perawatan rutin, petani datang kembali ketika pada saat rumput laut akan di panen, tentunya hasilnya tidak sebaik dan sebanyak rumput laut yang mengalami perawatan. Usaha rumput laut ini sangat menjanjikan sekali hasilnya bagi masyarakat yang berada di pesisir dan pulau.

Data Perkembangan Ekspor Rumput Laut Sulawesi Selatan Tahun 1998- 2007

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (000 US \$)
2008	13.943,3	16.768,8
2009	20.241,7	17.619,3
2010	41.558,2	47.445,3
2011	64.099,6	68.697,5
2012	66.586,3	61.673,4

Sumber : DKP Sulawesi Selatan, 2013

Selama 5 tahun yaitu tahun 2008- 2012, volume ekspor rumput laut Sulawesi Selatan menunjukkan kenaikan 377,55 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan pasar rumput laut dunia untuk kebutuhan industri pangan, pakan, farmasi dan kosmetik.

Pada tahun 2011 – 2012, volume ekspor rumput laut masih naik

3,88 persen namun nilai ekspor menurun sebesar US\$ 7.024.000 akibat terjadi penurunan harga rata-rata rumput laut dari US\$ 1.071 per ton tahun 2011 menjadi US\$ 926 per ton tahun 2012. Terjadinya penurunan harga rumput laut disebabkan adanya peningkatan produksi di Indonesia dan Filipina.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan, realisasi volume ekspor rumput laut hingga Juli 2013 mengalami kenaikan kembali. Volume ekspor sekitar 42.000 ton dengan nilai ekspor US\$ 40.000.000. Angka tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun 2012 dengan volume ekspor 37.000 ton dan nilai ekspor US\$ 36.400.000.

Selain bertani rumput laut, masyarakat pesisir masih mempunyai pilihan-pilihan mata pencaharian lainnya yang biasanya dilakukan pada musim paceklik. Pada umumnya mereka pergi ke kota menjadi tukang bangunan yang dibayar harian atau mingguan. Seperti diutarakan oleh seorang bapak, tidak adanya pilihan pekerjaan yang bisa dilakukannya di desa pada musim paceklik, maka dia pergi ke kota Makassar untuk mencari pekerjaan sebagai buruh bangunan.

Untuk bertahan di desa terasa amat sulit baginya karena ada keluarga besar yang membutuhkan biaya hidup. Selain menjadi buruh bangunan, masih menurut bapak ini, ada juga rekannya yang kemudian bekerja sebagai supir pete-pete atau menarik becak. Ditambahkannya yang paling penting pekerjaan itu halal.

Pilihan pekerjaan seperti ini dilakukan oleh masyarakat pesisir karena tidak ada pilihan selama musim paceklik. Hal tersebut salah satunya disebabkan adanya kerusakan lingkungan pesisir yang menyebabkan kemiskinan masyarakat karena tidak bisa mengambil manfaat lagi dari sumber daya alam pesisir yang selama ini menopang kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau.

Kebijakan pemerintah tentang pengembangan dan pembangunan kawasan pesisir selama ini juga mengalami hambatan, terutama dalam mengimplementasikan program-program dalam pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat rentan pesisir termasuk

dalam kategori kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja.⁷ Struktur sosial itu tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah, maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Timbulnya ketergantungan yang kuat antara pihak masyarakat rentan pesisir kepada kelompok diatasnya yang secara ekonomi lebih kuat (baca: punggawa) akan melahirkan hilangnya posisi tawar masyarakat rentan pesisir dan timbulnya ketimpangan sosial dan hubungannya bisa sangat eksploitatif.

Masyarakat rentan pesisir khususnya nelayan dan perempuan dalam posisi seperti ini akan berada pada pihak yang lemah karena tidak memiliki alternatif pilihan hidup yang lebih baik. Struktur seperti akan mengunci mereka dalam ruang dan mengurung mereka dalam kemiskinan secara turun temurun. Hubungan eksploitatif seperti ini tentunya sangat mendera salah satu pihak, untuk lepas dari ikatan tersebut tentu sangat diperlukan tindakan untuk merubah struktur patron – klien.

Pemerintah berkewajiban besar untuk merubah struktur tersebut dan tidak membiarkan praktek-praktek eksploitatif ini terjadi terus. Kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir harus mampu mewujudkan praktek-praktek pembangunan yang lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat rentan pesisir ketimbang hanya berfokus pada projek yang biasanya selama ini terjadi.

Kemiskinan kultural biasanya muncul karena akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, dan kurang memiliki keinginan untuk bekerja lebih keras lagi. Masyarakat pesisir biasanya sangat bersikap apatis hanya berserah kepada nasib atau biasa mereka katakan memang sudah seperti itulah takdir ditentukan buat mereka. Padahal penting sekali untuk mengintegrasikan diri kedalam lembaga-lembaga yang ada tujuannya agar mereka mulai membuka diri dan bergaul dengan

⁷ Nasution AB, 2005. *Isu-isu Kelautan Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm 130

lingkungan sosialnya. Tantangan yang dihadapi sangat berat untuk mengubah budaya yang telah mendarah daging di tengah masyarakat, ditambah lagi terkadang tidak ada keinginan untuk memperbaiki situasi ini.

Masyarakat pesisir yang sepertinya ini biasanya hanya tahu bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam pesisir tanpa memikirkan bagaimana mengelolanya supaya tetap bisa dirasakan oleh anak cucu ke depannya.

Banyak contoh di lapangan terjadi, masyarakat pesisir yang memiliki area hutan mangrove terus menebang hutan secara besar-besaran untuk kepentingan jangka pendek tetapi berakibat buruk untuk jangka panjang.

Area mangrove yang dimiliki secara pribadi dijual kepada pihak ketiga untuk dijadikan tambak dan merusak ekosistem pesisir. Pada awalnya dengan penebangan besar-besaran dan penaburan pupuk yang mengandung zat kimia sehingga banyak jenis ikan, udang atau kepiting yang hilang atau tidak bisa lagi dicari dengan mudah seperti sebelumnya.

Bagi perempuan rentan khususnya, mereka kehilangan pekerjaan sebagai pencari udang, ikan dan kepiting di kaki-kaki pohon bakau. Ekosistem hutan bakau yang rusak akibat pembabatan hutan telah menyebabkan berkurang bahkan hilangnya ikan, udang dan kepiting di kawasan hutan bakau.

Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir

PENGLOLAAN sumber daya alam berbasis masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggungjawab, dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola sumberdayanya sendiri dengan terlebih dahulu mendefenisikan kebutuhan, keinginan, tujuan serta aspirasinya. Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat ini menyangkut juga pemberian tanggungjawab agar mereka mampu mengambil keputusan untuk memutuskan apa yang terbaik buat kehidupan mereka untuk jangka panjang ke depannya.

Keterlibatan masyarakat pesisir disini diartikan dimana semua komponen terlibat termasuk didalamnya perempuan. Perempuan memegang peranan penting untuk mengelola sumber daya yang tersedia di pesisir, walau dalam kenyataannya selama ini perempuan justru paling sering ditinggalkan dalam proses pengembangan wilayah pesisir.

Kedekatan perempuan dengan alam sudah terbukti dari berabad-abad yang lalu dimana perempuanlah yang memiliki pengetahuan lebih banyak tentang apa yang harus dilakukan agar lingkungan dan alam sekitarnya tetap lestari. Perempuan bekerja mengelola tanah atau melakukan pertanian tanpa melakukan pengrusakan sehingga anak cucunya tetap bisa merasakan manfaat dari alam dan lingkungan yang lestari.

Hubungan perempuan dengan alam dilakukan dengan saling menghormati dan tidak eksploitatif, selayaknya apa yang terjadi selama ini di komunitas kita. Hubungan antara individu dalam pengelolaan alam lebih condong melahirkan hubungan persaingan sehingga keluarannya adalah saling mengeksploitasi, namun manakala hubungan di komunitas itu bisa diatur dengan baik maka tentu ikatannya menjadi lebih harmonis untuk kelangsungan hidup dimasa yang akan datang.

Keterlibatan masyarakat didalam pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek ekonomi dan ekologi. Didalam pelaksanaannya terjadi pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan beriringan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu membaca kebutuhan masyarakat, demikian juga dengan masyarakat harus mampu melakukan upaya pengelolaan yang berkelanjutan dan tidak cenderung merusak.

2

BELAJAR DARI PENGALAMAN PEREMPUAN

Pada sebagian besar kebudayaan yang ada, perempuan telah menjadi pelindung dan pemelihara keanekaragaman hayati. Mereka memproduksi, mengembangkan kembali, mengkonsumsi serta melestarikan keanekaragaman hayati dalam bidang pertanian. Namun demikian, dalam masyarakat kebanyakan, dengan segala aspek dari kerja dan pengetahuan perempuan, peranan mereka dalam pembangunan dan pelestarian keanekaragaman hayati telah diterjemahkan sebagai non-kerja dan non-pengetahuan.

Tenaga kerja dan keahlian perempuan telah didefinisikan ke dalam alam, meskipun pendefinisian itu berdasar pada budaya dan praktek ilmiah. Namun konsep pelestarian keanekaragaman hayati perempuan berbeda dari gagasan dominan patriarki mengenai pelestarian keanekaragaman hayati.¹

Ekofeminisme lahir dari gerakan ekologi yang membela kehidupan alam berpadu dengan gerakan feminis yang membela kehidupan perempuan yang mengalami diskriminasi dalam budaya dan struktur sosial yang di dalamnya ada ketidakadilan gender dan ras yang dihubungkan pada ideologi eksploitasi dan degradasi lingkungan².

Ada beberapa faktor yang mendasar yang sangat mempengaruhi krisis ekologi dan dampaknya terhadap eksistensi perempuan dalam kesatuannya dengan alam:

Pandangan dualisme manusia dan alam. Dalam pandangan ini, laki-laki dianggap sebagai manusia yang sempurna, sehingga perempuan tidak mendapat tempat dalam porsi manusia, karenanya perempuan lebih di-identikkan dengan alam. Konsekuensinya perempuan dan alam dapat dikuasainya³.

Konstruksi pemikiran hierarki patriarkhal yang sudah mapan dalam tradisi Kekristenan yang berat sebelah, yang memberikan kepada manusia penguasaan atas alam. Pandangan seperti ini merujuk pada kitab Kejadian 1-3, yang menggambarkan sebuah justifikasi Allah memberikan amanat kepada manusia (merujuk pada Adam) untuk

1 Vandhana Shiva, Maria Mies, *Ecofeminism Perspektif Gerakan perempuan dan Lingkungan*, IRE Press, 2005, hlm 193

2 Rosemary Radford Ruether, *Gaia and God*, hlm. 2. Lihat juga Noel Sturgeon, *Ecofeminist Natures: Race, Gender, Feminist Theory and Political Action*, (London: Routledge 1997), hlm. 23

3 Anne Primavesi, *From Apocalypse to Genesis: Ecology, Theology and Christianity*, (Minneapolis: Fortress Press, 1991), hlm. 48

menguasai dan menaklukkan bumi ⁴.

Dari kenyataan tersebut, kalangan ekofeminis melihat bahwa ada semacam struktur hierarki patriarkhal yang sangat kuat, di mana sifat maskulin diidentifikasi lebih rasional sedangkan alam tidak rasional, hanya pasif, karena fungsinya yang hanya menghasilkan. Fungsi hanya menghasilkan ini diidentifikasi sama dengan perempuan yang sifatnya pasif. Sifat pasif dilekatkan kepada perempuan dengan sistem reproduksinya yang melahirkan, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, memasak, mencuci, menyediakan kehidupan pangan yang tergantung pada alam.

Alam tidak hanya dipandang sebagai fungsi alat (menghasilkan), tetapi pemberi kehidupan. Prinsip tersebut adalah prinsip feminin, sama seperti Ibu yang mengandung benih kehidupan, dan melahirkan kehidupan. Jadi tidaklah berlebihan kalau alam disimbolkan sebagai Ibu. Pemahaman seperti ini bukan saja lahir dari sebuah proses identifikasi semata, melainkan ada sebuah semangat yang dibangun untuk mewakili eksistensi perempuan dengan alam. Semangat yang dibangun itu tidak lain adalah spiritualitas yang lebih holistik yang melekat pada alam yang mewakili totalitas hidup perempuan. Menurut Starhawk sebagaimana dikutip oleh Rosemarie Putnam Tong, Spiritualitas yang dimaksud adalah spiritualitas yang *Earth Based* (berbasis bumi)⁵

Untuk itu peranan perempuan didorong di berbagai sektor agar mereka juga terlibat sebagai subjek pembangunan. Kebijakan pemerintah juga mengharuskan agar perempuan terlibat dalam forum-forum pengambil kebijakan, misalnya saja dalam pembuatan Musyawarah Rencana Pembangunan. Perempuan telah mulai dalam mengidentifikasi segala masalah yang ada disekelilingnya, serta memikirkan strategi yang tepat untuk menyelesaikannya. Keterlibatan aktif perempuan dalam penyusunan rencana pengembangan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

4 Rosemary Radford Ruether, *Sexism and God – Thought*, (London: SCM Press, 1983), hlm. 65

5 Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought : A More Comprehensive Introduction*, (Colorado: Westview Press, 1998), hlm. 262.

Di awal keterlibatan perempuan tidak mudah bagi mereka untuk memahami alur dan proses perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah karena selama ini peran perempuan sangat minim di ranah publik (masyarakat). Melalui diskusi-diskusi perencanaan yang difasilitasi oleh Oxfam dan Mitranya terkait dengan isu - isu pembangunan masyarakat khususnya perempuan mengatakan "... banyak diantara kami (baca perempuan) telah memahami proses dan prosedur perencanaan dan kami tidak asing lagi dengan istilah RPJM, RKP serta istilah lainnya. Kami tidak lagi diam saja seperti dahulu pada setiap pertemuan karena kini telah mengerti apa yang diperbincangkan oleh pemerintah dan bapak-bapak yang ada di desa. Kami aktif menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya perempuan dan anak, karena kini kami tahu mekanisme pembangunan, dahulu kalau mau bertanya pun kami tidak tahu apa yang mau dipertanyakan. Kami kini berani menyampaikan usulan karena kalau kami diam dan malu maka yang akan rugi adalah kami sendiri. Kini juga banyak diantara kami (baca : perempuan) juga sudah pintar membaca dan menulis, karena tahu berita-berita yang berkembang di luar desa.

Apa yang dilakukan Oxfam dan Mitranya sejalan dengan isi pasal 27 dan 28 UUD 45 yang mengatur kedudukan, hak dan kewajiban warga negara di mata hukum dan pemerintahan. Menurut salah seorang anggota kelompok perempuan dari Kabupaten mengatakan kini, "Secara kuantitatif dan kualitatif sudah mulai banyak perempuan secara aktif terlibat dalam bidang-bidang pembangunan baik sosial, pendidikan, kesehatan, budaya atau bahkan politik. Persepsi masyarakat mulai berubah yang tadinya beranggapan bahwa tempat perempuan hanya didalam rumah namun kini masyarakat (khususnya laki-laki) melihat bahwa perempuan juga punya kemampuan untuk berpartisipasi.

Fungsi strategis perempuan sama persis dengan laki-laki, peran aktif mereka dalam politik akan memberikan pengaruh pada proses kebijakan dan perundangan dalam isu pembangunan secara keseluruhan dan khususnya untuk mendorong tingkat kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, ekonomi perempuan lebih baik lagi.

Di Indonesia sejak tahun 1987 telah memasuki isu perempuan dalam agenda politik. Isu-isu yang dimaksudkan ialah kebijakan yang berkaitan langsung dengan perempuan, seperti kesehatan,

perkawinan, pendidikan, dan segala aspeknya. Hingga kinipun isu-isu perempuan tetap masih didorong baik oleh negara ataupun organisasi non pemerintah. Oxfam adalah salah satu lembaga yang mempunyai visi untuk merubah kondisi ketidakadilan yang dialami perempuan melalui berbagai upaya pemulihan kehidupan agar perempuan nantinya diharapkan bisa menikmati hak-haknya tanpa ada diskriminasi, intimidasi atau berbagai bentuk ketidakadilan lainnya yang bisa melemahkan kondisi perempuan itu sendiri.

Masyarakat merasakan bahwa pendampingan yang dilakukan selama ini telah memberikan ketrampilan perempuan dalam menyampaikan gagasannya. Mereka menyadari kenapa perempuan juga perlu terlibat di berbagai aktifitas kemasyarakatan. Dalam pelatihan yang dilaksanakan oleh Oxfam salah seorang peserta mengungkapkan, "penting sekali untuk hadir dan bersuara dalam aktifitas di desa, banyak kebijakan dan program pemerintah Kabupaten yang bisa diakses oleh perempuan. Absennya perempuan dari berbagai aktifitas itu mampu memarginalkan dan menghilangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan hak-haknya. Ide strategis yang disampaikan perempuan harus bisa meyakinkan banyak pihak bahwa perempuan membutuhkannya, seperti pendidikan dan kesehatan untuk perempuan.

"sesungguhnya perempuan itu cerdas dan punya kemampuan yang sama dengan laki-laki selama ini ruang untuk bersuara tidak diberikan secara bebas sehingga hanya tahu rumah dan takut untuk keluar dan ditanya-ditanya. Sekarang saya dan teman-teman yang didalam kelompok sudah banyak yang berubah, sayapun setiap kali selesai pelatihan yang dilakukan oleh Oxfam biasanya saya akan sampaikan kembali kepada suami. Awalnya memang sangat susah untuk memberikan pemahaman saya butuh waktu lama karena tetap ada saja penolakan. Namun saya berpikir tetap saya harus sampaikan ke orang terdekat terlebih dahulu sebelum ke masyarakat atau teman-teman lain di kelompok." (Sabariah, Kelompok Sipatuju)

Walau tidak gampang untuk menciptakan perubahan di masyarakat, kelahiran para inisiator sangat diharapkan agar kesenjangan teknologi, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya dapat diminimalisir. Kemiskinan bukan hal yang hanya harus terus dibicarakan namun penting untuk mendorong masyarakat dalam penemuan solusinya. Keran informasi menjadi salah satu aliran yang harus dimiliki perempuan, sehingga mereka mampu untuk menyampaikan langsung kepada pengambil kebijakan untuk menemukan solusinya. Selama ini dalam praktek di masyarakat suara perempuan yang ditiptkan kepada kelompok lain tidak mampu menemukan jawaban dari kebutuhan dan kepentingan perempuan itu sendiri. Lebih miris lagi dalam satu pertemuan di salah satu desa yang didampingi, fasilitator juga belum mampu melihat isu strategis dari perempuan. Ketika usulan keluar untuk program pemberdayaan perempuan maka yang muncul adalah alat memasak atau membuat kue, padahal isu kesehatan reproduksi menjadi hal penting lain yang perlu diselesaikan.

Mengelola hal yang biasa menjadi luar biasa

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun proyek pemulihan penghidupan masyarakat pesisir di 4 Kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan, Oxfam dan Mitra memfasilitasi pembentukan lembaga ekonomi desa yang coba diinisiasi untuk memastikan keberlanjutan kelompok usaha ekonomi masyarakat. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia di desa-desa pesisir Oxfam dan mitranya memfasilitasi agar mereka memiliki kemampuan untuk membangun kemandiriannya.

YKL salah satu mitra mendorong agar lembaga ekonomi desa mampu memfasilitasi pengembangan usaha KUP seperti permodalan dan pemasaran bersama untuk 3 komoditi utama yang dikelola oleh kelompok yaitu rumput laut, kepiting dan peternakan itik. Termasuk pengelolaan barang-barang yang telah didistribusikan ke kelompok selanjutnya akan dikembalikan oleh anggota KUP.

Untuk menguatkan lembaga ini telah dilaksanakan Pelatihan Kelembagaan Keuangan Mikro bagi KUP yang dihadiri oleh anggota dan pengurus dari kelompok usaha peternakan itik, pengupasan

kepiting. Kedepannya kelompok-kelompok ini terbuka untuk kerja sama dengan kelompok/pengupasan lain, sepanjang sistemnya seragam dan standarnya sesuai dengan pihak exportir. Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro telah muncul di beberapa KUP antara lain di KUP Melati Desa Rewatayya dan KUP Parannuangku Desa Tompotana, Tanakeke. Sementara di Maros bisa ditemukan di KUP Ujung Parappa, Bunga Seroja dan Bunga Melati.

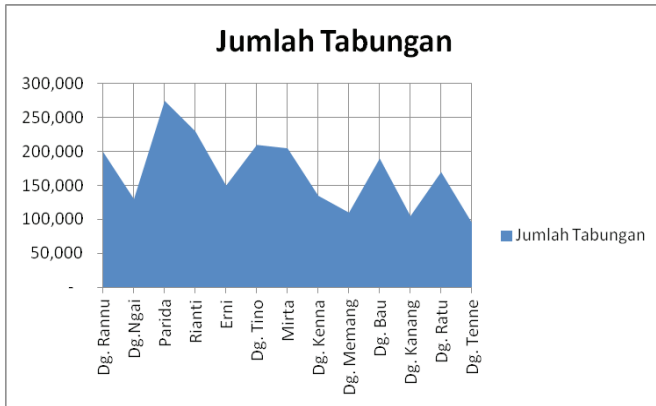
Melalui KUP, anggota kelompok diajarkan untuk menabung serta mengurangi kebiasaan untuk meminjam pada punggawa. Kebiasaan menabung selama ini belum menjadi kebiasaan di masyarakat, setiap kali panen biasanya uang langsung dibelanja untuk hal yang tidak begitu penting. Pada waktu masa tanam berikutnya para petani rumput laut akan mengutang lagi kepada punggawa untuk membeli bibit, tali dan kebutuhan lainnya. Praktek lain yang telah tumbuh pada masyarakat adalah model pemasaran bersama dimana kelompok bisa menjual ke pembeli yang harga belinya lebih tinggi karena tidak ada keterikatan dengan punggawa. Tentu saja pola ini jauh lebih menguntungkan bagi petani itu sendiri karena memang bisa menaruh harga sesuai dengan harga pasar pada saat itu. Kekuatan untuk penentuan harga jual berada sepenuhnya pada petani sehingga kontrol pasar bisa disetir langsung. Model pemasaran bersama rumput laut telah dilakukan di Dusun Camba-cambayya, Desa Tompotana yang terdiri atas 4 KUP yaitu KUP Parannuangku, KUP Setia Kawan, KUP Tamalanrea dan KUP Cahaya Bahari.

Hasil panen rumput laut dari keempat KUP ini akan dikumpulkan di KUP Parannuangku yang ditunjuk sebagai pengelola untuk menjual ke Takalar Daratan. penjualan bersama telah dilakukan di bulan Februari 2015.

Adapun pemasaran rumput laut di KUP di Desa Rewatayya yang selama ini langsung dijual sendiri oleh anggota, kini telah disepakati untuk dijual oleh Kelompok. Adapun anggota yang masih terikat ke punggawa akan menjual sebagian ke kelompok dan sebagian lagi ke punggawa dengan perbandingan 30:70. Dibawan ini adalah salah satu contoh tabungan anggota kelompok yang didampingi oleh YKL di Kepulauan Tanakeke, Desa Rewatayya.⁶

6 Annual Report YKL Year 5

Tabungan Anggota KUP Melati (Des 2014)



Pulihnya penghidupan masyarakat tidak lepas dari meningkatnya kesadaran mereka untuk berpartisipasi dalam struktur pembangunan di negeri ini, masyarakat mengejar ketertinggalan selama ini khususnya bagi perempuan pesisir. Perbaikan tata kehidupan dalam berbagai sektor sangat berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan di negara ini. Namun banyak orang yang tidak terlalu memusingkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu perempuan pesisir, perencanaan hanya lebih menitikkan fokus pada pembangunan atau infra struktur dan pembangunan sumber daya manusianya jauh tertinggal.

Berbicara soal kemiskinan, apalagi di negeri yang berpenduduk lebih kurang 240 juta jiwa ini, dimana lebih 50 persen dari populasi Indonesia adalah perempuan. Semua meja diskusi, seminar, workshop bahkan pelatihan baik di level desa, kabupaten, provinsi, nasional, regional dan internasional dalam pertemuan-pertemuan tersebut dicatat bahwa titik tolak pembicaraan, tidak akan pernah lepas dari kehidupan perempuan dan persoalan yang melilitnya.

Isu kekerasan terhadap perempuan, tenaga kerja, upah rendah, kesehatan reproduksi, buta huruf, kematian ibu, pekerja sek komersial, pekerja rumah tangga dan masih banyak lainnya lagi menjadi topik yang hangat dibicarakan. Mengapa demikian? Karena perempuan dalam wacana kemiskinan, adalah kelompok yang sangat rentan terhadap persoalan ini. Bahkan lebih ekstrim lagi,

ketika membicarakan soal kemiskinan, baik di Indonesia, maupun di belahan dunia lainnya, maka perempuan selalu ada di dalamnya.

Seakan cerita kemiskinan adalah miliknya kaum perempuan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kemiskinan itu identik dengan perempuan. Ironis memang tetapi tidak cukup untuk dibicarakan saja dalam ruang-ruang tertutup untuk mengubah kondisi ini. Pemerintah dalam hal ini harus didorong keras untuk merubah kondisi yang timpang terhadap perempuan.



3

**OXFAM DAN
RESTORASI
PENGHIDUPAN
MASYARAKAT PESISIR**

A. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESIR

Oxfam bersama dengan mitra-mitranya baik LSM lokal, universitas, pemerintah dan pihak swasta melakukan pengembangan program berwawasan pesisir dengan memperhatikan kebutuhan spesifik pesisir. Keterbatasan masyarakat dalam penguasaan ilmu, teknologi, modal, ketrampilan, informasi dan kelembagaan usaha menciptakan masalah yang berimplikasi pada kapasitas masyarakat. Beberapa pendekatan yang dilakukan Oxfam memperhatikan masalah, aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat.

1. Mengembangkan Mata Pencarian Alternatif

PENGEMBANGAN mata pencarian alternatif dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa sumber daya pesisir secara umum dan perikanan tangkap secara khusus telah banyak mengalami tekanan dan degradasi.

Data empiris menunjukkan bahwa sudah terlalu banyak nelayan yang berkonsentrasi di perairan tertentu serta banyak masyarakat pesisir yang memanfaatkan laut untuk budidaya rumput laut. Potensi ikan laut yang tersedia sudah tidak mampu dijadikan andalan bagi peningkatan kesejahteraan khususnya bagi nelayan tradisional karena jumlah ikan mulai berkurang di perairan yang tidak begitu dalam. Ditambah lagi pola penangkapan ikan oleh pemilik kapal besar terkadang menangkap ikan yang juga masih kecil sehingga jumlah ikan berkurang karena *overfishing*.

2. Akses Terhadap Modal

STRATEGI pemberdayaan masyarakat rentan pesisir adalah pengembangan akses modal. Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya saat ini masyarakat rentan pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan serta rumput laut sangat sulit untuk memperoleh modal.

Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal bagi bisnis ini. Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai dengan status nelayan dan petani rumput laut yang umumnya rendah dan tidak mampu secara ekonomi membuat mereka sulit untuk memenuhi syarat-syarat perbankan yang selayaknya diberlakukan seperti perlu adanya *collateral*, *insurance* dan *equity*.

OXFAM dalam prakteknya tidak memberikan "*cash grant*", masyarakat diberikan *in kind material* atau alat kerja atau material sesuai dengan kebutuhan untuk mempercepat pengembangan usaha. Diharapkan upaya bantuan seperti ini lebih menjamin keberlanjutan dibandingkan dengan memberikan uang secara tunai yang sangat beresiko karena mudah disalahgunakan untuk keperluan konsumtif.

Untuk mendapatkan akses modal atau keuangan, OXFAM dan mitranya memfasilitasi kelompok ekonomi yang sudah layak dan mampu mengelola keuangan kelompok ke pihak swasta dan pemerintah. Untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab atau dukungan yang diberikan, dalam praktek pemberian alat kerja tersebut masyarakat didorong agar bisa membantu anggota kelompok lain melalui perguliran.

Melalui perguliran ini diharapkan dapat menjamin bahwa ada anggota masyarakat lainnya dapat mendapatkan manfaat atas dukungan yang diberikan oleh Oxfam. Ini juga menjadi bagian penting dari proses pemberdayaan yang dilakukan di tengah kelompok masyarakat, positifnya dari model ini adalah adanya penambahan manfaat dari perguliran material kerja bagi anggota atau kelompok baru di dusun atau desa yang dibantu. Hingga tahun ke-lima ini ada 7 KUP yang telah menggulirkan ; antara lain Ujung Parappa di Maros, Sipakainga, Melati, Sipammaling-malingi, Setia Kawan, Parannuangku, Tamalanrea di Kabupaten Takalar. Dukungan Oxfam yang terbatas kepada kelompok awal menerima ternyata bisa dikembangkan sendiri oleh masyarakat sendiri. Pola ini membuktikan bahwa proses pemberdayaan itu sendiri berjalan karena masyarakat sudah memiliki kemampuan untuk berbagi sumber daya yang dimilikinya kepada anggota lain yang tidak pernah mendapatkan dukungan.

3. Peningkatan Kapasitas

MASYARAKAT pesisir di berikan pelatihan-pelatihan mulai dari membuat perencanaan usaha ekonomi alternatif, menentukan kebutuhan dengan satuan anggaran, jadwal pelaksanaan, menghitung keuntungan, pengemasan produk, pelatihan tentang perencanaan pembangunan, pelatihan tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta gender.

Dengan peningkatan kapasitas bagi masyarakat pesisir tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan ketrampilan atau penambahan pemahaman pada jangka panjang masyarakat mampu berpikir kritis. Kemampuan masyarakat untuk mencari akar serta memecahkan masalah yang mereka hadapi, terutama terkait dengan kesadaran untuk pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam pesisir secara berkelanjutan. Perubahan sikap masyarakat masyarakat mengantarkan mereka untuk menuju kepada tingkat kesejahteraan dimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan mereka baik strategis maupun praktis.

4. Akses Terhadap Pasar

PASAR adalah faktor penarik dan bisa menjadi kendala utama bila pasar tidak berkembang. Karena itu membuka akses pasar adalah cara untuk mengembangkan usaha karena bila tidak ada pasar maka usaha sangat terhambat perkembangannya.

Untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan masyarakat pesisir Oxfam mendekatkan kelompok dengan pelaku pasar serta bekerjasama dengan sektor swasta dan pemerintah yang mempunyai kewajiban dalam pengembangan usaha kecil dan menengah.

Keuntungan dari hubungan seperti ini yaitu masyarakat mendapat tempat pemasaran, jaminan dan harga pasar. Pembinaan terhadap kelompok usaha masyarakat terutama ditujukan dalam hal peningkatan kualitas produk, promosi, fasilitasi tempat pemasaran dan bantuan modal oleh pihak swasta dan pemerintah untuk pengembangan pemasaran usaha masyarakat.

5. Pengembangan Kelompok Usaha

PEMBERDAYAAN melalui pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan kelompok usaha bersama. Hanya di sini istilah yang digunakan adalah aksi kolektif yaitu untuk membuka kesempatan kepada masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang diinginkannya yang tidak semata-mata koperasi atau kelompok usaha bersama. Bentuk aksi kolektif bisa berupa forum, asosiasi atau jaringan usaha dengan tujuan untuk pengembangan usaha dan kesejahteraan anggota.

Lebih kurang 75 Kelompok usaha berdiri dengan beberapa jenis usaha yang dikembangkan seperti usaha peternakan itik, rumput laut, kerupuk rumput laut, abon ikan, dodol, selai rumput laut dan masih banyak yang lainnya. Yayasan Konservasi Laut adalah salah satu mitra Oxfam yang mendampingi kelompok usaha di Kabupaten Takalar dan Maros. Hingga kini ada sekitar 22 kelompok yang intensif di damping sebanyak 7 kelompok ada di Kabupaten Maros dan 15 berada di Takalar.

No	Kelompok Usaha	Kab. Takalar	Kab Maros
1	Ujung Parappa		√
2	Bunga Seroja		√
3	Nelayan Bersatu		√
4	Bunga Bahagia		√
5	Bunga Melati		√
6	Api-api		√
7	Anggrek		√
8	Sipakainga	√	
9	Sipammaling-malingi	√	
10	Melati	√	
11	Jaya Sukses	√	
12	Melati Ayu	√	
13	Setia Kawan	√	
14	Parannuangku	√	
15	Tamalanrea	√	
16	Baji Areng	√	
17	Baji Minasa	√	
18	Cahaya Bahari	√	
19	Mutiara Putih	√	
20	Citra Pesisir	√	
21	Paraikatte	√	
22	Cahaya Laikang	√	

Selama didampingi kelompok diajarkan banyak hal dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia didalam kelompok itu sendiri. Mengajarkan kelompok untuk saling terbuka dan jujur dibuatlah aturan kelompok, yang didalamnya mengatur tugas masing-masing pengurus termasuk anggota. Pembukuan dibuat sesuai dengan prosedur keuangan yang mampu dilakukan kelompok namun tetap memenuhi standar pencatatan yang benar. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan dari kontribusi tiap anggota selama proses produksi di kelompok sehingga setiap orang menerima pendapatan.

Seperti yang dipaparkan oleh YKL pada laporan kegiatan bahwa semua kelompok diberikan peningkatan kapasitas dalam memahami prosedur pencatatan administrasi keuangan. Kelompok telah berupaya membuat pencatatan secara rapi. Hasil evaluasi rutin dari YKL bahwa 4 KUP di Desa Laikang telah melakukan *cash count* setiap pertemuan kelompok.

6. Kolaborasi dengan pengambil kebijakan

SALAH satu upaya untuk menghubungkan program-program yang dikembangkan oleh masyarakat dan Oxfam dengan pemerintah dilakukan melalui kolaborasi. Upaya ini adalah bagian dari strategi untuk jangka panjang. Pemerintah diharapkan untuk mendukung program-program pengembangan masyarakat pesisir yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan porsi angka kemiskinan saat ini.

Upaya kolaborasi perlu dilakukan agar pemerintah mengingat kembali tugas besarnya yang selama ini juga banyak dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Kolaborasi bertujuan untuk menguatkan program pemerintah yang sudah ada sehingga program pemerintah lebih efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi, dengan membuat kebijakan dan implementasi program yang berpihak kepada masyarakat rentan pesisir.

Pendekatan program dilakukan melalui prinsip kesetaraan gender. Salah satu ciri sosial masyarakat pesisir adalah kuatnya peran perempuan atau istri nelayan dalam melakukan aktivitas ekonomi maupun pengambilan keputusan. Dalam posisi yang demikian ini, sasaran pemberdayaan di daerah pesisir menjadi hal yang wajib

untuk melibatkan perempuan, terutama kepala keluarga perempuan yang tercatat sebagai kelompok yang paling rentan. Oleh karenanya program ini bukan hanya untuk laki-laki saja.

Seringkali program pemberdayaan bias kepada laki-laki sehingga laki-laki saja yang selalu diajak berdiskusi dan memecahkan masalah tanpa melibatkan perempuan. Banyak proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah dan LSM justru sering melupakan kelompok perempuan, OXFAM sebagai sebuah lembaga internasional yang sangat perhatian untuk memberikan kesempatan dan peluang yang setara dan adil bagi perempuan dan laki-laki.

Dalam diskusi-diskusi di desa dan kabupaten, OXFAM berusaha agar peserta yang hadir berasal dari pemerintahan desa dan kabupaten, kelompok perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan agar masalah dan kebutuhan masyarakat, terutama perempuan rentan dapat diketahui secara jelas.

Selama ini suara kelompok perempuan rentan jarang di dengar karena banyak orang berpikir bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak mudah berkomunikasi sehingga kelompok yang benar-benar membutuhkan bantuan jarang didatangi. Akibatnya, informasi yang diperoleh justru bias dengan kepentingan informan elite pesisir tersebut, sehingga banyak program pemberdayaan yang hanya menyentuh elite pesisir yang sebenarnya tidak perlu diberdayakan. Oleh karena itu, sudah saatnya pemberdayaan sosial masyarakat pesisir laki-laki dan khususnya perempuan saat ini berorientasi pada kelompok sasaran yang tepat.

7. Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat

MENURUT Ndraha (1990), diacu dalam Lugiarti (2004), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilah meliputi; (1) partisipasi dalam / melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial, (2) partisipasi dalam memperhatikan / menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya, (3) partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan, (4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional, (5) partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan,

yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan. Kelima aspek itu didorong agar dapat terwujud di tengah masyarakat melalui pendekatan program yang selama ini dilakukan. Pertanian organik yang dikembangkan melalui program RCL telah memberikan ide kepada masyarakat agar pengetahuan ini ditularkan kepada anak-anak di sekolah dasar yang ada di desa Pitusunggu. Jufri dan beberapa teman lainnya dari kelompok Pita Aksi memberikan pendidikan lingkungan hidup. Beliau adalah salah seorang guru honor di SD Negeri 17 Pitusunggu, sekolah ini telah mendapatkan penghargaan “Adiwiyata” dari pemerintah. Penghargaan Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang dinilai berhasil mendidik siswa menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Penilaian Adiwiyata didasarkan pada 4 kriteria, yakni; pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, pengembangan kegiatan berbasis partisipatif, dan pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung sekolah. Penganugerahan penghargaan Adiwiyata merupakan rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup.

Di Kecamatan Ma’rang ada sekitar 30 sekolah pada saat itu yang dinilai dan 6 sekolah yakni SD 5, 14, 4, 3, 17 dan 22 adalah sekolah-sekolah yang memberikan pendidikan lingkungan hidup dalam mata pelajaran yang disampaikan oleh guru melalui muatan lokal. Menurut Jufri jauh hari sebelum mendapatkan penghargaan itu, murid-murid telah diajarkan untuk berkebun ini dilakukan karena mereka tinggal di daerah pesisir dan melihat bagaimana kerusakan lingkungan secara besar-besaran sedang terjadi. Lingkungan pesisir akan terus rusak manakala tidak dilakukan beberapa upaya penyadaran ditingkat masyarakat dan tentu saja akan memberikan dampak buruk bagi mereka yang tinggal di wilayah itu. Pengetahuan yang didapat oleh Jufri melalui sekolah lapang adalah modal awal untuk menyebar luaskan informasi kepada anak-anak dan orang tua mereka juga.

Dengan memberikan pelajaran kepada anak-anak mereka memahami apa yang sedang terjadi di desanya, pesan-pesan penyelamatan lingkungan disampaikan kepada orang tua mereka yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan pengelola tambak. Dalam pelajaran tersebut ada beberapa materi yang disampaikan kepada anak terkait dengan cara bertanam, pencemaran, jenis

pencemaran, kerusakan lingkungan dan dampaknya, bertani yang sehat, kerusakan tanah dan lain sebagainya. Menurut Jufri, awalnya mata pelajaran muatan lokal ini berisi tentang perikanan dan adat istiadat, kemudian beliau dan beberapa guru didukung juga oleh kepada sekolah menambahkan lebih banyak tentang pendidikan lingkungan hidup. Saat ini SD Negeri 17 Pitusunggu menjadi sekolah percontohan yang berbasis Lingkungan Hidup dan banyak dikunjungi oleh sekolah-sekolah lain di luar Kecamatan Ma'rang untuk belajar. Sekolah Dasar ini ditunjuk oleh pemerintah untuk membina sekolah lain dalam memberikan mata pelajaran Lingkungan Hidup. Untuk mempraktekan ilmu yang didapat di sekolah anak-anak belajar langsung melihat ikan di kolam yang ada di belakang sekolah serta perkebunan organik. Sekolah mendapatkan bantuan dari BLHD mesin pembuat kompos dan alat pengangkutan sampah, guru-guru di sekolah ini mengkoordinir anak-anak dalam mengerjakannya.

Terkait dengan partisipasi masyarakat untuk menyusun perencanaan desa, Oxfam memfasilitasi agar masyarakat Desa Bonto Bahari, Kecamatan Bontoa membentuk tim review RPJMDes. Struktru tim terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Kepala Dusun, Perwakilan Perempuan, KPMD, Kader desa, Tokoh Pemuda dan Wakil Masyarakat. Untuk memperkuat kerja tim ini dibuatlah Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Bahari. Keterlibatan masyarakat ini dinilai sangat penting sebagai sebuah bentuk dari kepedulian akan proses pembangunan yang dilaksanakan di desa mereka.

B. PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

MULAI dari tahun ketiga OXFAM memberikan dukungan alat kerja dan material seperti bebek, mesin penetas, rumput laut dan alat pertanian bagi masyarakat rentan pesisir baik perempuan dan laki-laki untuk mempercepat pengembanga usaha mereka.

Kegiatan pemberian bantuan berupa alat kerja dan material telah dilakukan pada tahun ketiga dan keempat. Sebelum pemberian bantuan ini dilakukan Oxfam melakukan proses *asessement* atau penilaian terkait kebutuhan dengan kemampuan kelompok dalam pengelolaan alat kerja dan material yang akan diberikan. Setelah ditemukan kelompok potensial yang akan menerima bantuan selanjutnya dibuatlah pertemuan antara Oxfam dengan kelompok

masyarakat. Pertemuan dimaksudkan untuk membicarakan beberapa hal terkait dengan jenis usaha yang akan dijalankan, pengelolaan usaha, pengelolaan hasil panen, pemasaran hasil panen serta yang penting dari itu semua adalah perguliran bantuan kepada pihak lain. Pendataan penerimaan bantuan berikutnya dilakukan bersama oleh pengurus kelompok dan anggota kelompok dengan syarat penerima sebagai berikut :

1. Merupakan petani asli rumput laut
2. Berasal dari keluarga yang kurang mampu / rentan
3. Ada kerjasama antara suami dan istri
4. Bersedia mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam kelompok

Selanjutnya diatur pula mekanisme perguliran bantuan dimana disyaratkan pada putaran pembibitan yang pertama masing-masing anggota memberikan kepada penerima perguliran yang telah terdaftar sejumlah yang diterima awal. Pada tahap selanjutnya, setiap anggota memberikan kepada kelompok hasil panennya sebanyak 2% dari hasil panen rumput laut kering sebagai tabungan dan disimpan serta dikelola oleh kelompok itu sendiri, ini juga dapat digunakan sebagai pinjaman modal bagi anggota.

Perjanjian kerjasama antara Oxfam dan Kelompok selanjutnya dibuat dengan menjelaskan tujuan dukungan yang diberikan, besar dan jenis dukungan material, peran dan tanggung jawab Oxfam dan kelompok. Dalam rincian tanggung jawab Oxfam menjabarkan tentang pendanaan untuk dukungan bantuan material bagi kelompok. Oxfam juga akan menyediakan pendampingan teknis, seperti pelatihan, memfasilitasi kesepakatan-kesepakatan didalam kelompok serta melakukan pemantauan kemajuan dari intervensi yang dilakukan. Kelompok yang menerima bantuan harus bertanggung jawab mengelola bantuan yang diberikan secara maksimal, berkelanjutan dalam bentuk perguliran sesuai dengan kesepakatan kelompok. Pemerintah desa juga dilibatkan untuk mengontrol serta memastikan bantuan yang diberikan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

Ibu Hadana ketua kelompok As-Syurah di Desa Pitusunggu telah menerima bantuan rumput laut pada hari Sabtu, tanggal 6 bulan Desember 2014, jenis Cottonii sebanyak 2.774.000 Kg. Rumput laut ini akan dibagikan kepada 13 orang anggota kelompok setiap orang akan

menerima lebih kurang 163 kg bibit rumput laut yang siap ditanam. Pada panen berikutnya kelompok ini juga telah menentukan sebanyak 13 orang lainnya akan menerima perguliran. Selain kelompok As-Syurah ada beberapa kelompok lainnya di Pangkep yang telah menerima bantuan bibit rumput laut seperti kelompok Sipadacengi dan Berkah. Besarnya jumlah bantuan perkelompok tidaklah sama hal ini disebabkan karena berbedanya jumlah bentangan yang dikelola serta jumlah anggota ditiap kelompok.

Dukungan material lain juga diberikan kepada Kelompok Kalaroang berupa alat tangkap kepiting (rakkang). Masyarakat di Dusun Kekean, Desa Tamarupa bermata pencaharian sebagai penangkap kepiting selain mereka juga bekerja sebagai petani rumput laut.

No	Material/ Peralatan	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Jumlah
1	Rakkang	1100 buah	14.900	16.390.000
2	Tali no.3	110 gulung	26.000	2.860.000
3	Tali no. 4	110 gulung	55.000	6.050.00
			Total	25.300.000

Bantuan distribusikan kepada 11 kelompok, pekerjaan menangkap kepiting ini dilakukan oleh masyarakat sepanjang tahun dan pada musim-musim tertentu rata-rata mereka bisa mendapatkan 5 – 7 kg sedangkan pada saat tidak musim banyak kepiting bisa didapatkan sekitar 1 – 3 kg. Makin banyak rakkang yang dipasang biasanya hasil tangkapan juga semakin banyak, biasanya harga perkilo kepiting berkisar Rp. 35.000 – Rp. 50.000. Untuk menjual hasil tangkapan masyarakat tidak punya masalah dalam hal pemasarannya, karena di dusun ada penampung yang menerima kepiting yang ditangkap oleh masyarakat dan si pengumpul langsung membayarkan langsung seharga kepiting yang diterima olehnya.

Bagi masyarakat yang bermata pencaharian peternakan mendapatkan bantuan bebek, seperti kelompok Asoka di desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja di Kabupaten Barru. Kelompok ini berjumlah 20 orang mendapatkan bantuan bebek. Dipilihnya bebek oleh masyarakat karena selama ini mereka telah punya pengalaman dalam mengembangkan jenis usaha ini. Perkembangan ternak bebek mempunyai prospek yang bagus saat ini. Mulai dari telur dan daging bebek khususnya untuk Sulawesi Selatan permintaanya cukup tinggi.

Sistem pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat secara intensif (dikurung/dikandang) dengan memperhatikan segala kebutuhan akan pakan serta perkandangan yang memenuhi persyaratan, pemilihan bibit yang baik serta pemeliharaan dan pencegahan penyakit. Sejuah ini pemasaran tidak mengalami hambatan karena pembeli datang langsung ke peternak. Dalam pemeliharaan bebek dalam kelompok Asoka mereka telah menyepakati dilakukan secara berkelompok, tidap kelompok terdiri dari 5 orang.

Dari studi kelayakan usaha yang dilakukan oleh kelompok mereka menggambarkan dengan asumsi telur yang dihasilkan 60% - 70% perhari (bulan pertama) maka hitungannya sebagai berikut;

1	Pengeluaran	
	a. Pembelian 300 ekor bebek @ Rp.35.000	Rp.10.500.000
	b. Biaya pakan 300 ekor bebek 1800 kg/bulan	Rp. 2.1600.000
	c. Biaya vitamin 50 bungkus/bulan	Rp. 100.000
	d. Biaya obat memperlancar bertelur 20 bungkus/bulan	Rp. 240.000
	Jumlah pengeluaran	Rp.13.000.000
2	Penerimaan Telur bebek (5400×Rp.1500/butir)	Rp. 8100.000
	Pendapatan	Rp. 4.900.000

Dari hasil studi kelayakan usaha diatas dapat dilihat pada bulan pertama pendapatan yang diperoleh hampir mengembalikan modal pokok, dan pada bulan selanjutnya usaha ini akan mendapatkan keuntungan maksimal. Selain memberikan bantuan bebek bagi anggota kelompok, Oxfam juga memberikan dukungan material pakan ternak, ini bertujuan hanya sebagai stimulan diawal pemberian bantuan. KUP Anggrek di Desa Marannu, Kabupaten Maros yang beranggotakan 22 orang juga telah menerima tambahan bantuan dari Dinas Peternakan. Kelompok ini mendapatkan 150 ekor bibit bebek, pakan 45 Kg dan tong air ukuran 1200 liter sebanyak 1 unit.

Banyak juga kelompok yang menerima bantuan peralatan produksi makanan olahan seperti kelompok, Rezeki, Cahaya Desa, Seroja,

Konya, Sipatokkong, Bahagia masih ada beberapa lainnya menerima bantuan yang berbeda. Kelompok-kelompok olahan makanan terus mengalami peningkatan jumlah produk yang mendatangkan peningkatan pendapatan bagi tiap anggota kelompoknya. Oxfam memfasilitasi asosiasi kelompok pengolahan makanan ini untuk memasarkan, pengemasan dan promosi produk. Sejauh ini ada 2 asosiasi yang didukung oleh Oxfam yang pertama “Latimpa” berada di Kabupaten Barru, dan satunya lagi berada di Kabupaten Pangkep asosiasi ini bekerja sama dengan Dinas Kelautan Perikan serta Dinas Perdagangan dan Industri.

Selain itu juga di Kabupaten Takalar kelompok “Setia Kawan”, juga menerima bantuan bibit rumput laut. Anggota kelompok ini berjumlah 12 orang dengan beberapa orang di tiap KK yang menjadi tanggungan seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini

No	Nama	LK/PR	Jabatan	Jumlah Tanggungan
1	Nurmiati Dg. Fuji	Pr	Ketua	5 orang: 3 laki-laki dan 2 perempuan
2	Nuripa Dg. Bau	Pr	Sekretaris	6 orang: 5 laki-laki dan 1 perempuan
3	Satria Dg. Rimang	Pr	Bendahara	3 orang: 2 laki-laki dan 1 perempuan
4	Bunga Dg. Nginga	Pr	Anggota	4 orang : 4 laki-laki
5	Sitti Dg. Ngaga	Pr	Anggota	4 orang : 3 laki-laki dan 1 perempuan
6	Calla Dg.Bau	Pr	Anggota	2 orang : 2 laki-laki
7	Rukia Dg. Tayu	Pr	Anggota	3 orang : 3 laki-laki
8	Jumiati Dg. Bollo	Pr	Anggota	4 orang : 4 laki-laki
9	Lobbo Dg. Bau	Pr	Anggota	4 orang : 4 laki-laki
10	Jiba Dg. Kanang	Pr	Anggota	4 orang : 4 laki-laki
11	Sariana Dg. Lu'mu	Pr	Anggota	4 orang : 2 laki-laki dan 2 perempuan
12	Bahagia Dg. Pajja	Pr	Anggota	3 orang : 2 laki-laki dan 1 perempuan

Masing-masing anggota kelompok menanam rumput laut di lahannya, dikarenakan tidak adanya lokasi yang cukup luas untuk

digunakan sebagai lahan bersama. Penanam rumput laut ini dikerjakan bersama-sama dengan istri dan suami, pendekatan bantuan ekonomi yang dilakukan oleh OXFAM disyarakatkan penerima bantuan adalah rumah tangga miskin.

Jumlah bibit yang dibutuhkan tiap anggota kelompok adalah 100 kg yang ditanam menjadi 5 bentang. Pada panen pertama, semua hasilnya akan dijadikan bibit agar bisa dikembangkan menjadi 30 – 35 bentang.

Setelah panen, hasilnya kemudian akan dikumpulkan di kelompok dan dijual bersama. Hasil penjualan ini kemudian dibagi berdasarkan banyaknya hasil panen yang dikumpulkan oleh anggota kelompok, dan sebagian dimasukkan ke dalam kas kelompok sebagai simpanan kelompok.

Terkait kemana hasil panen akan dijual dan berapa banyak yang harus disimpan ke dalam kelompok oleh masing-masing anggota, hal ini dibicarakan bersama-sama dengan anggota kelompok. OXFAM juga melatih kelompok untuk mampu membuat perkiraan keuntungan yang akan didapat, misalnya saja apabila setiap anggota kelompok mendapat dukungan bibit sebanyak 100 kg, maka pada waktu panen pertama semua hasilnya akan dijadikan bibit dan ditanam kembali.

Apabila anggota kelompok Setia Kawan dapat menanam rumput laut hingga mencapai 100 bentang, maka pada panen pendapatannya anggota kelompok sebagai berikut :

$$100 \text{ bentang} \times 10 \text{ kg} \times \text{Rp. } 8.000 = \text{Rp. } 8.000.000$$

$$\text{Rp. } 8.000.000 \times 3 \text{ kali panen} = \text{Rp. } 24.000.000$$

$$\text{Rp. } 24.000.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 2.000.000/\text{bulan/keluarga}$$

Kelompok Cahaya Laikang di Desa Laikang Kabupaten Takalar juga menerima bibit rumput laut yang diterima oleh 9 orang anggota kelompok dan tiap anggota kelompok mendapatkan 300 kg, tali nomor 3 sebanyak 95 rol, tali nomor 6 sebanyak 14 rol, tali nomor 1 dan 5 sebanyak 54 bungkus. Kelompok Jaya Sukses berjumlah 7 orang mendapatkan masing-masing 200 kg bibit serta tali untuk mengangkat bibit rumput laut, Kelompok Melati Ayu sebanyak 15 orang anggota kelompok dan tiap anggota kelompok mendapatkan 200 kg bibit, Kelompok Sipakatau berjumlah 8 orang dan tiap orang

mendapatkan 150 kg, sedangkan kelompok Wati Community mendapatkan bantuan tali ikat rumput laut seharga Rp. 33.297.000, kelompok Paraikate mendapatkan 3300 kg bibit yang akan dibagikan kepada 12 anggota kelompok,

No	Barang	Unit	Jumlah
1	Bibit rumput laut (cottonii)	kg	3300
2	Tali no 3	rol	176
3	Tali no 1 dan 5	pack	88
4	Tali no 6	rol	11
5	Botol	buah	2112

Kelompok Mutiara Putih, Baji Areng, Baji Minasa di Kabupaten Takalarta berdasarkan proposal yang diajukan ke Oxfam serta hasil penilaian dari tim memberikan dukungan peralatan. Ketiga kelompok mendapatkan peralatan berupa blender, alat memasak, alat press, penggilingan adonan dan lain sebagainya, alat ini dipergunakan untuk membuat produk olahan makanan ringan yang diproduksi oleh kelompok ini.

Kelompok Ujung Parappa di kabupaten Maros pada tahun keempat juga menerima dukungan alat untuk penangkapan kepiting (bubu) serta pembuatan rumah produksi sebesar Rp. 38.340.000 yang ditransfer dengan 3 tahapan, tahap 1 senilai Rp. 12.840.000, tahap 2 senilai Rp. 10.175.000 untuk pengerjaan dinding, tiang dan WC dan tahap 3 senilai Rp. 9.870.000 untuk pengerjaan kusen, atap dan finishing. Oxfam melakukan monitoring untuk setiap tahapan yang dilakukan oleh kelompok. Sebanyak 20 orang anggota kelompok mendapatkan manfaat langsung dari pengadaan rumah produksi ini. Dalam hal lahan yang dipakai sebagai tempat rumah produksi maka dibuat "Surat Perjanjian Penggunaan Lahan" yang ditanda tangani antara pemilik lahan dan anggota kelompok. Dalam perjanjian tersebut termaktub beberapa pasal yang mengatur tentang penggunaan lahan. Dijelaskan bahwa lahan akan dipakai sebagai tempat usaha pengolahan kepiting yang dilakukan kelompok Ujung Parappa. Pihak kedua meminjam lahan kepada pihak pertama tanpa biaya apapun dan tanpa batas waktu tertentu selama lahan tersebut digunakan untuk kepentingan usaha kelompok Ujung Parappa. Pihak

kedua dalam hal ini kelompok berkewajiban untuk membayar iuran dan pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada pemerintah setempat setiap tahun sejak lahan digunakan. Diharapkan kelompok akan mampu meningkatkan pendapatan anggotanya yang sebelumnya hanya mendapatkan Rp. 40.000 / bulan /orang.

Kelompok Ujung Parappa akan menerima bahan baku dari kelompok penangkapan ketipiting lainnya misalnya dari Pasir Putih dan Melati atau masyarakat lainnya dengan harga kompetitif. Perguliran rumah produksi untuk kelompok pasir putih akan dilakukan jika kelompok telah siap dan akses jalan sudah lancar sehingga memudahkan kelompok Pasir Putih mendapatkan air bersih dan es kristal. Untuk kelompok Melati dukungan rumah produksi akan diberikan jika ada kekompakan dari kelompok ini dimana hasil tangkapan kepiting anggota akan disetor untuk diolah di kelompok. Kelompok bersedia menggulirkan manfaat dengan mensponsori pembuatan miniplan lainnya atau usaha sejenis buat kelompok / masyarakat di desa lain yang memenuhi syarat sebagai upaya mendorong pemasaran bersama dan tanggung jawab sosial kelompok.

Kelompok Ujung Parappa sejauh ini telah memiliki legalitas usaha seperti : SITU, P.IRT, SIUP, TDP dan TDI. Pada tahun ketiga bantuan yang telah diterima dari OXFAM berupa : kompor, blender, wajan dan penggilingan, gerinda dan tabung gas dari YKL juga memberikan penggilingan, alat press dan timbangan.

Kelompok ini sudah relatif bagus dan mendapatkan dukungan lainnya dari Koperidag, Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan. Kesepakatan diantara kelompok yang terbangun adalah (1) Bahwa anggota mau membayar perbulan supaya digulirkan dan bisa digunakan kembali untuk membeli atau mengganti alat yang sudah rusak, (2) Semua hasil tangkapan di jual ke kelompok agar mempermudah mendata hasil yang didapat pada setiap bulan, (3) Kewajiban menyimpan dan menabung di koperasi setiap bulan agar dana yang tersimpan bisa di gunakan masyarakat dan anggota lainnya dan mau bekerja secara aktif di kelompok.

Dukungan Oxfam kepada kelompok memberikan perubahan terhadap peningkatan penghasilan dan kolaborasi program dengan Pemerintah Daerah. Kelompok Tupabiring di Desa Nisombalia,

Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros juga menerima dana pembangunan pusat penetasan dan pakan senilai Rp. 23.745.000. Dana ini akan ditransfer melalui 2 tahapan yaitu tahap 1 senilai Rp. 13.045.000 untuk pembangunan kandang, tahap 2 senilai Rp. 10.700.000 untuk pembuatan alat tetas dan biaya pakan. Sama dengan kelompok Ujung Parappa, kelompok membuat perjanjian dengan pemilik lahan dimana kandang ini dibuat. Alat penetasan itu dan pakan yang didukung oleh Oxfam ditujukan untuk meningkatkan ketahanan penghidupan. Pusat penetasan yang dibuat berada di dusun Kuricadi dan dikelola sepenuhnya oleh Kelompok Tupabiring. Adapun rincian dukungan yang diterima oleh Kelompok Tupabiring sebagai berikut :

No	Alat/bahan	Jumlah	Unit	Harga satuan	Total harga
1	Induk itik	345	ekor		
2	Kandang budidaya	1	unit	10.045.000	13.045.000
3	Penetasan set	5	unit	1000.000	1000.000
4	Pakan	1000	kg	5.700	57.000.000
5	Alat giling tepung ikan	1	unit	1.600.000	1.600.000
					25.345.000

Manfaat pusat penetasan dan pakan bagi kelompok :

1. Kelompok Tupabiring akan menggulirkan manfaat yang didapat kepada kelompok lainnya yang ada di Maros (6 kelompok) dalam bentuk anakan itik, sebagian dari jumlah telur yang berhasil menetas.
2. Pakan hasil produksi akan diprioritaskan diberikan ke kelompok lainnya dengan harga akan lebih murah dari harga jual di pasar.
3. Untuk menjamin keberlangsungan manfaat antara kelompok Tupabiring yang mengelola pusat penetasan dan pakan dengan kelompok lainnya di Maros, maka kelompok yang menerima anakan (perguliran) wajib menyeter kembali kepada

Klender musim yang dibuat oleh kelompok Ujung Parappa

No	Mata Pencarian	Satu Tahun/Bulan											
	Potensi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kepiting	xx	xxx	xxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxx	xxxx	xx
2	Ikan/Udang	xx	xxx	xxx	xxxx			xxxx	xxxxx	xxxxx	xxx	xx	
3	Rumput Laut			xx	xxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx	
4	Sango-Sango							xx	xxx	xxxxx			

Keterangan :

xx : Kurang
 xxx : Sudah Mulai Ada
 xxxx : Sudah Mulai Banyak
 xxxxx : Sudah Banyak

kelompok Tupabiring dalam bentuk telur itik untuk ditetaskan hingga senilai anakan itik yang diterima. Telur yang disetor akan diseleksi oleh kelompok Tupabiring untuk memastikan kualitas telurnya.

4. Telur yang berhasil menetas selanjutnya akan dibagi dua antara kelompok Tupabiring dengan kelompok yang menyerahkan telur. Demikian seterusnya sehingga menjamin

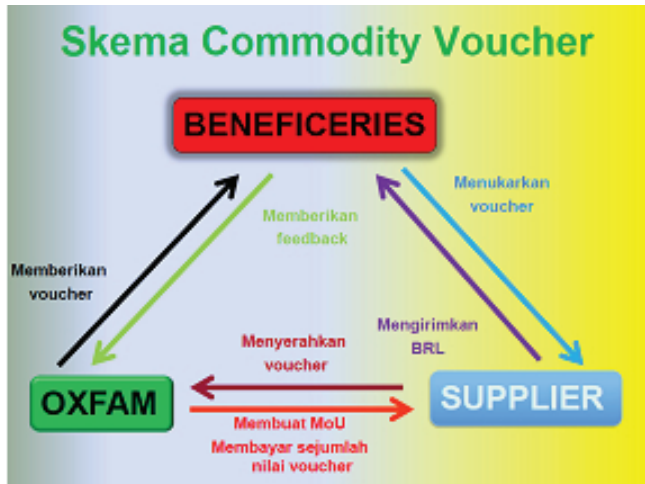
Bila diperhatikan klender musim diatas terlihat kepiting selalu tersedia di sepanjang bulan sedangkan *sango-sango* hanya ada pada 3 bulan dimulai pada bulan 7, 8 dan 9. Jenis usaha ini bisa dijalankan baik oleh perempuan maupun laki-laki, walau sebenarnya lebih banyak laki-laki yang melakukannya namun sangat memungkinkan kalau perempuan juga mampu mengerjakannya.

Hingga tahun keempat RCL (2014) beberapa capaian kelompok terhadap akses dan kontrol, antara lain :

1. Membuka akses bagi Kelompok Usaha Perempuan Pesisir untuk mendapatkan peluang ekonomi yang lebih baik jika dibandingkan pada saat mereka belum bergabung dengan program RCL.
2. Akses komunikasi juga sudah terbuka dengan pemerintah setempat dimana pemerintah Kabupaten sudah tertarik untuk memberikan bantuan dan pendampingan kepada Kelompok binaan RCL.
3. KUP sudah memiliki kemampuan mengolah sumber daya pesisir lokal yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan sebagai sumber pendapatan seperti teh kali-kali, gula nipah dan olahan berbasis ikan, arang bambu.
4. KUP juga memiliki pengetahuan terkait dengan pertanian organik, perlakuan organik terhadap lahan pertanian dan tambak serta sudah terbentuk jaringan kerja dengan pasar swalayan, pasar lokal serta pihak swasta.
5. KUP memiliki jaringan kerja dengan sesama petani organik, perempuan pesisir, dan pemerintahan desa.

C. PENYALURAN BANTUAN MELALUI KUPON KOMUNITAS

Dalam pendistribusian barang di tahun ketiga OXFAM menggunakan kupon komoditas (Commodity Voucher), cara ini sangat efektif juga untuk menggerakkan ekonomi lokal Kelompok Usaha Perempuan Pesisir.



Beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum barang disalurkan antara lain :

- Mengidentifikasi pedagang atau supplier yang bersedia berpartisipasi
- Membuat nota kesepakatan dengan pedagang atau supplier yang bersedia berpartisipasi
- Melakukan sosialisasi kepada kelompok penerima tentang mekanisme kupon komoditas (commodity voucher)
- Menyebarkan informasi kepada pembeli dan pedagang
- Memastikan waktu penukaran bertepatan dengan kalender tanam lokal, dalam kasus input pertanian

Keuntungan dari Kupon Komoditas ini antara lain :

- Kelompok Usaha Perempuan Pesisir dapat memilih komoditas yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka
- Sistem ini menawarkan untuk kesempatan untuk mobilisasi sosial dan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat

 OXFAM Commodity Voucher No Seri : 02.01.1234 100 KG Bibit Rumput Laut	 OXFAM Commodity Voucher No Seri : 02.01.1234 100 KG Bibit Rumput Laut Dapat diukir pada suplier yang ditetapkan baik diporjai belikan atau diukir dengan uang Berlaku sampai dengan : 26 Maret 2013	 OXFAM Tanda Serah Terima Voucher No Seri : 02.01.1234 Tanggal Terima : _____ Nama Penerima : _____ No. Telp/ HP : _____ Tanda Tangan : _____
--	--	---

 OXFAM Commodity Voucher No Seri : 02.01.1234 100 KG Bibit Rumput Laut	 OXFAM Commodity Voucher No Seri : 02.01.1234 100 KG Bibit Rumput Laut Dapat diukir pada suplier yang ditetapkan baik diporjai belikan atau diukir dengan uang Berlaku sampai dengan : 26 Maret 2013	 OXFAM Tanda Serah Terima Voucher No Seri : 02.01.1234 Tanggal Terima : _____ Nama Penerima : _____ No. Telp/ HP : _____ Tanda Tangan : _____
--	--	---

 OXFAM Commodity Voucher No Seri : 02.01.1234 100 KG Bibit Rumput Laut	 OXFAM Commodity Voucher No Seri : 02.01.1234 100 KG Bibit Rumput Laut Dapat diukir pada suplier yang ditetapkan baik diporjai belikan atau diukir dengan uang Berlaku sampai dengan : 26 Maret 2013	 OXFAM Tanda Serah Terima Voucher No Seri : 02.01.1234 Tanggal Terima : _____ Nama Penerima : _____ No. Telp/ HP : _____ Tanda Tangan : _____
--	--	---

- OXFAM maupun masyarakat yang akan menerima bantuan tidak akan membayar ongkos pengangkutan
- Masyarakat rentan pesisir atau penerima manfaat program RCL lebih aktif : mereka tidak hanya menerima bantuan, sehingga mereka memiliki kepentingan terkait keberhasilan program
- Adanya bazar atau penjualan terbuka dalam proses penukaran Kupon Komoditi memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota masyarakat untuk membeli dan menjual komoditi (produk).
- Setelah bazar resmi ditutup, para pedagang atau supplier mungkin akan menjual ke seluruh masyarakat, bukan semata-mata kepada penerima manfaat (pemilik Kupon).
- Bazar memberikan kesempatan untuk pertukaran pengetahuan diantara para pembeli, produsen dan pedagang
- Bazar merupakan cermin "normal" sistem pasar, menjamin harkat dan martabat penerima manfaat sekaligus memperkuat peluang dan jaringan perdagangan
- Pedagang dan produsen lokal memiliki akses ke uang tunai, yang meningkatkan bisnis dan ekonomi rumah tangga mereka.

D. TANTANGAN DALAM UPAYA MENGUATKAN KELOMPOK USAHA PEREMPUAN

KELOMPOK Usaha Perempuan menghadapi hambatan-hambatan dalam mengelola usaha ekonomi produktif yang sedang dijalankan oleh mereka misalnya saja kekurangan modal, terbatasnya jaringan pasar, keterbatasan penguasaan teknologi yang tepat guna, serta terbatasnya penguasaan keterampilan manajemen dan penguasaan teknis produksi adalah contoh problem terkait dengan teknis usaha.

Hambatan-hambatan tersebut selama ini berusaha diminimalisir dengan cara memberikan peningkatan kapasitas untuk memperbaiki manajemen kelompok, sistem pencatatan keuangan, pemasaran, pengemasan produk, mendorong partisipasi perempuan dalam forum-forum pengambil kebijakan, meningkatkan kesadaran kritis perempuan dalam proses menggali potensi di desa dan sebagainya.

Kelompok usaha perempuan telah membuka jaringan dengan dinas-dinas terkait seperti dinas kelautan dan perikanan, dinas perdagangan dan industri, koperasi, kesehatan terkait dengan pembuatan PIRT serta kelompok swasta lainnya untuk mendukung kemajuan bisnis kelompok perempuan. Beberapa kelompok yang ada di Kabupaten Pangkep dan Barru sudah mengalami kemajuan dalam memproduksi olahan makanan dan telah membangun sistem pemasaran yang reguler. Permintaan pasar akan produk kelompok yang didampingi oleh Oxfam melalui proyek RCL juga telah mengalami peningkatan yang signifikan. Produksi kelompok perempuan yang ada di desa secara kuantitas dan kualitas diminati oleh pasar dan telah dikenal di luar desanya.

Oxfam dan mitranya memfasilitasi persolan struktural yang dihadapi perempuan selama ini misalnya adanya beragam peraturan yang tidak kondusif atau tidak berpihak bagi perempuan untuk pengembangan usaha karena kurang sensitif gender, seperti perbankan dan institusi lain dalam memberikan layanan kredit dan program yang menekankan pada kepala keluarga sebagai penerima manfaat. Melalui pelatihan yang diberikan Oxfam pemerintah dan instansi yang terkait dengan perizinan dan sebagainya juga dilibatkan tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas

dari sumber-sumber yang ada di pemerintahan. Ketidak pahaman masyarakat juga sering ditimbulkan karena mereka tidak memahami mengenai prosedur/sistem yang dibangun. Untuk itu Oxfam memfasilitasi masyarakat agar bisa mendapatkan akses informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber yang ada. Untuk mendorong kemajuan masyarakat dalam ekonomi produktif salah satu upaya konkrit yang sedang dilakukan oleh Oxfam adalah memberikan cash grant kepada kelompok. Kelompok yang akan menerima ini tentu ada kriteria yang ditetapkan misalnya terkait dengan penghasilan/pendapatan kelompok, juga melihat kekuatan kelompok selama ini dalam mengelola dukungan material yang telah diterima serta perkembangannya. Secara umum mekanisme yang dibangun adalah bahwa Oxfam akan bekerja sama dengan pihak Bank untuk melatih masyarakat agar memahami mekanisme perbankan dan tujuan lainnya adalah untuk mendekatkan kelompok masyarakat lembaga keuangan.

Persoalan struktural lain terkait dengan ketimpangan relasi antara perempuan dengan suami dan keluarga masih tetap ada di tengah masyarakat namun upaya penyadaran masyarakat tetap terus dilakukan bukan hanya oleh Oxfam namun juga oleh penggerak di masyarakat (CO). Memberikan pengetahuan dasar tentang hak-hak masyarakat baik perempuan dan laki-laki diharapkan bisa meningkatkan kesadaran mereka untuk lebih menghargai peran serta adanya pembagian kerja yang adil. Selama ini misalnya beban kerja domestik tidak berkurang atau tidak bisa dinegosiasikan dengan pihak laki-laki karena dianggap ranah domestik memang kewajiban perempuan untuk menanganinya. Mendorong keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proyek RCL ini memberikan pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki punya hak untuk aktif memberikan kontribusi dalam pembangunan di berbagai sektor yang ada di pesisir. Upaya ini dilakukan karena selama ini kesadaran masyarakat kita masih rendah untuk memahami bahwa pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kontrol yang sama dengan laki-laki dalam setiap proses pembangunan.

Dalam Kelompok-kelompok usaha perempuan yang didampingi oleh OXFAM dan mitranya, masih banyak pihak-pihak yang merasa keberatan kalau beban domestik juga bisa diambil alih sebagian oleh pihak laki-laki karena perempuan atau istri melakukan kegiatan

ekonominya. Padahal pengembangan usaha mau tidak mau berurusan dengan ranah publik yang membutuhkan perempuan sebagai pelaku usaha untuk berinteraksi dengan pihak lain .

Dalam ranah yang lain, tidak masuknya perempuan ke dalam angka statistik juga berakibat pada tidak tampaknya potensi perempuan dalam bidang ekonomi. Hal ini sebetulnya telah diungkapkan oleh hasil penelitian Ester Boserup tahun 1970-an.

Definisi tentang kerja yang bias gender, menjadi penyebab potensi perempuan dalam perekonomian tidak terlihat dalam data statistik. Implikasi yang lebih jauh, pemahaman tentang hambatan yang menghadang perempuan, kelebihan dan kelemahannya tidak dipahami, dan menyebabkan perempuan pengusaha menjadi sumber daya yang tidak tampak, tidak disadari, dan tidak dimanfaatkan. Sementara dalam realitasnya dilihat dari hasil survei ADB dan Kantor Meneg Koperasi dan UKM juga menunjukkan, perempuan pengusaha memiliki kekuatan dan potensi yang spesifik, yaitu nyata-nyata lebih berhati-hati dan realistis dibandingkan dengan mitra laki-lakinya.

Perempuan sangat mumpuni dalam administrasi dan keuangan, dapat diandalkan dalam pertanggungjawaban pinjaman ke bank, tidak begitu mengalami masalah dalam menghadapi perizinan usaha dan petugas pajak, mudah beradaptasi, dan mampu berkomunikasi dengan baik.

Tantangan khusus yang dialami perempuan serta kenyataan bahwa perempuan merupakan potensi yang luar biasa dalam ekonomi seharusnya mendorong para perencana dalam Tahun Mikro Kredit. Pengalaman yang disampaikan Pattareepan Pongwat mengenai Credit Union League of Thailand Women Cooperative Product Development Center (CULT WCPDC) memperlihatkan memang diperlukan upaya khusus untuk menjangkau perempuan pengusaha mikro yang umumnya buta huruf sehingga membatasi daya kreatif dan pengetahuan mereka.¹

Organisasi seperti OXFAM berupaya memastikan agar perempuan memiliki kemampuan untuk membangun kekuatan ekonominya secara mandiri dibarengi dengan beberapa intervensi lain yang berguna untuk membangun kepemimpinan perempuan.

¹ *Op cit*

E. MELATIH MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG PARTISIPATIF DAN RESPONSIF GENDER

OXFAM memfasilitasi KUP dalam membuat perencanaan yang partisipatif, dimana usulan berasal dari masyarakat (bersifat *bottom up*) dan *open menu*, namun yang terpenting pemberdayaan harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Selama ini perencanaan pembangunan lebih banyak menyentuh pembangunan fisik dalam sebuah pelatihan perencanaan yang dilakukan bersama dengan pemerintahan desa, ketika masyarakat ditanyakan apa yang terpikir oleh mereka ketika disebutkan kata-kata pembangunan jawabannya adalah jalan, jembatan dan gedung. Yang ada di kepala banyak orang adalah seperti itu makanya implementasi dari perencanaan itu semua pada akhirnya adalah fisik.

Dalam peningkatan kapasitas pemerintah desa terkait perencanaan diinformasikan bahwa sebenarnya dalam pembangunan itu bukan hanya melulu pembangunan fisik saja hal lain yang lebih penting adalah meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, itu masih jarang dilakukan. Kenapa semua usulan yang dari desa belum tertampung karena 90 % merupakan program fisik. Sehingga SKPD yang tidak berhubungan dengan program fisik akan kesusahan untuk mengimplementasikan kegiatannya dan mereka saat Musrembang banyak mengemis program karena usulannya selalu bersifat fisik. Dinas Kependudukan misalnya kadang protes karena tidak ada usulan buat mereka, Koperindag saja yang sifatnya langsung ke masyarakat sedikit sekali program yang bisa mereka implementasikan langsung buat masyarakat.

Pertanyaan awal kepada kelompok binaan, kenapa kita perlu membuat sebuah perencanaan? Hal awal yang penting untuk dilakukan adalah identifikasi data desa, di desa dilihat potensi, permasalahan, apa yang ada tersedia di desa dan apa kekurangannya atau apa yang masih harus diperbaiki/ditambah, jika kita mengetahui ini diawal-awal maka pembangunan di desa bisa direncanakan dengan baik. Tidak mungkin langsung tiba-tiba masuk pada fase perencanaan tanpa mengetahui isu yang muncul. Setelah melakukan perencanaan, beralih pada pelaksanaan dan kemudian

dilakukan *monitoring* dan evaluasi. Proses perencanaan di daerah pesisir penting untuk didorong karena selama ini pesisir sangat tertinggal dalam pembangunan pemerintah karena anggaran untuk pembangunan lebih banyak mengarah ke darat.

Pak Prayitno (Bappeda Maros) menegaskan dalam perencanaan penting juga di usulkan terkait dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia, itu bisa dilakukan dengan peningkatan kaspasitas masyarakat melalui pelatihan. Triknya adalah, di Maros ada banyak SKPD yang tidak mengusulkan untuk peningkatan SDM. Misalnya dinas Koperindag ada bidang koperasi, perindustian dan perdagangan, bagaimana meningkatkan SDM bisa dengan pelatihan pengurus koperasi. Kadang-kadang ada *study* banding. Kemudian ada dinas Pemuda dan Olahraga dan tersedia banyak pelatihan kepemudaan, dinas lainnya adalah dinas Kebudayaan bisa juga diajukan pelatihan dan pengembangan adat istiadat.

Masyarakat juga diingatkan bahwa untuk memperkecil kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, pada tahun 2000 dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua kementerian / lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan, sebagaimana yang terlihat pada sejumlah dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dasar pelaksanaan PUG dalam pembangunan 20 tahun ke depan dikuatkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005 – 2025. Walaupun kebijakan telah ada sejak 13 tahun yang lalu namun bukan berarti bahwa perencanaan pembangunan yang pada hari ini dilaksanakan telah sensitif gender, kebijakan ini dalam implementasinya masih jauh dari harapan. Para perencana pembangunan masih banyak yang mengabaikan kebijakan ini dalam pelaksanaannya mulai dari level desa hingga nasional, akibatnya program-program pembangunan banyak yang bias gender dimana kepentingan kelompok perempuan atau laki-laki rentan terabaikan. Bahkan sebahagian besar perencana berkomentar tidak perlu

PUG karena pembangunan itu dapat menggunakan analisa gender memang sudah pasti memberikan dampak dan manfaat kepada perempuan dan laki-laki. Anggapan yang salah seperti ini perlu diluruskan segera karena kalau tidak maka masyarakat rentan (perempuan dan laki-laki) tetap akan berada posisi kerentanannya karena proses pembangunan tidak sensitif kepada mereka.

F. KERUSAKAN DAN UPAYA PERBAIKAN EKOSISTEM PESISIR

Kerusakan ekosistem sudah terjadi di daerah pesisir dimana intensitasnya semakin kuat. Sebagai contoh, sebagian wilayah laut dangkal di sebagian desa telah berkurang jumlah ikannya yang menyebabkan para nelayan harus berlayar lebih jauh lagi. Biasanya nelayan yang berlayar hingga jauh jumlah mereka antara 10 – 20 orang dalam satu kapal penangkap ikan, misalnya sebagian besar kelompok nelayan (*punggawa* dan *sawi*) di Desa Pajukukang memutuskan untuk yang berlayar ke wilayah laut Kalimantan Selatan selama berbulan-bulan (sampai 6 bulan) untuk menangkap ikan-ikan besar.

Selain kemungkinan telah terjadi *overfishing*, faktor lain yang menyebabkan berkurangnya jumlah ikan adalah *destruktif fishing* yaitu bahan kimia (*potassium*, *sianida*), *tuba* dan bahan peledak atau *bom ikan*. Budidaya tambak dan rumput laut yang tidak ramah lingkungan dengan penggunaan antibiotik dan pupuk kimia juga menjadi penyebab pencemaran laut dan berkurangnya ikan.

Masifnya budidaya tambak dan rumput laut yang tidak ramah lingkungan karena menggunakan pupuk kimia, dan ditambah dengan sampah (termasuk limbah MCK (sabun, deterjen) atau rumahtangga yang tidak dikelola dengan baik semakin meningkatkan jumlah limbah kimia atau bahan non organik yang mengalir ke laut.

Akumulasi dari limbah ini telah berdampak buruk pada sifat fisika, kimia, dan biologi air laut. Demikian juga halnya dengan kawasan hutan bakau. Sebagian besar kawasan ini mulai rusak dan luasannya berkurang cukup signifikan karena konversi masif untuk tambak-

tambak, diambil kayunya untuk bahan pembuatan arang (Desa Maccini Baji, Kabupaten Takalar), serta dijadikan sebagai WC umum di beberapa desa (Desa Maccini Baji dan Desa Mattiro Baji, Kabupaten Takalar).

Kondisi tersebut tentunya menimbulkan banyak faktor negatif yang berdampak kepada kualitas kehidupan masyarakat. Ketika musim hujan biasanya sampah yang dibuang begitu saja oleh masyarakat akan terlihat mengapung-apung. Penyakit akan mudah datang pada saat-saat seperti ini karena air terus menggenang di sekitar rumah. Bentuk rumah panggung yang di bawahnya penuh sampah yang dibawa oleh air hujan menyebabkan sampah bertumpuk dan menjadi tempat sarang nyamuk.

Kondisi hidup masyarakat seperti yang dipaparkan diatas memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat; baik perempuan maupun laki-laki. Beban hidup semakin bertambah sementara alam sudah mulai tidak bersahabat dengan manusia, dahulunya perempuan bisa dengan mudah mendapatkan sumber bahan pangan dan kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Kebutuhan untuk memasak seperti kayu bakar biasanya mereka tidak kesulitan karena memang persediaannya sangat banyak.

Dahulu kayu bakar diambil dari ranting-ranting pohon yang mudah didapati karena luasnya hutan mangrove. Ketika musim hujan air tidak tergenang seperti sekarang yang terkadang menimbulkan bau tidak sedap.

Seiring dengan berjalannya waktu, karena banyaknya hutan mangrove yang ditebang untuk keperluan atau perluasan tambak, masyarakat telah kehilangan sebagian besar sumber penghidupannya.

Untuk kawasan sawah, di Desa Boddie (Kabupaten Pangkajene Kepulauan), sebagian besar sawah telah terintrusi air laut karena banyaknya pembuatan tambak. Merespon kualitas sawah seperti ini, dikarenakan tidak dapat ditanami padi, maka pemilik sawah memutuskan untuk mengkonversinya menjadi tambak. Persediaan mata air di daratan pesisir di sebagian desa juga terintrusi air laut sehingga menyebabkan beberapa desa lokasi penelitian mengalami kesulitan untuk pengadaan air bersih.

Di Desa Madello (Kabupaten Barru) dan Desa Pajukukang (Kabupaten Maros), sebagian sumur-sumur warga telah berair asin sehingga tidak layak lagi untuk digunakan, baik untuk air minum ataupun MCK. Di Desa Nisombalia (Kabupaten Maros), warga desa hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber air bersih mereka. Ketika kemarau, warga desa harus membeli air bersih ke Makassar dengan menggunakan perahu.

Perubahan ekosistem, berpengaruh luas kepada iklim dan berdampak jangka panjang kepada bertambahnya beban dan tugas perempuan dan laki-laki karena harus beradaptasi terhadap perubahan yang “*massive*” seperti ini. Seyogyanya ` pemerintah harus mengambil beberapa langkah strategis agar kehidupan masyarakat tidak jauh lebih terpuruk lagi.

Seorang perempuan anggota kelompok yang didampingi dalam program RCL mengungkapkan bahwa mereka sangat susah sekali untuk mendapatkan sumber-sumber penghidupan. Cuacapun sudah tidak menentu, kadang kalau hujan lebat sekali akan diikuti dengan datangnya banjir yang merusakkan lahan tambak dan pertanian masyarakat. Demikian juga sebaliknya bila musim kering, desa-desa akan kekeringan. Masyarakat kehilangan sumber air bersih buat kebutuhan sehari-hari. Pada musim seperti ini mereka tidak mungkin menanam apapun karena tidak ada air untuk menyirami tanaman. Area persawahan terbengkalai tidak terpakai karena selama ini para petani hanya bergantung dari hujan yang datang pada musim-musim tertentu saja.

Tantangan lain yang dihadapi oleh masyarakat pesisir selain kurang atau tidak adanya sumber air tawar di wilayah pesisir adalah pencemaran air tanah.

Pencemaran air merupakan salah satu masalah serius yang bisa mengganggu kesehatan, lingkungan bahkan bisa mempengaruhi kegiatan ekonomi. Bahan pencemaran atau *polutan* di perairan pantai berasal dari kegiatan rumah tangga, daerah aliran sungai, pertanian, dan lain-lain.

Penyebab utama pencemaran wilayah pesisir adalah: (1) masih rendahnya kepedulian industri sepanjang DAS dan pesisir terhadap sistem pengolahan limbah cair yang masuk ke perairan umum ; (2) kurang ketatnya pengawasan limbah oleh instansi terkait ; (3) belum jelasnya penerapan sanksi terhadap industri yang melanggar isi dokumen Amdal dan peraturan perundangan yang berlaku (PP 27/99 tentang Amdal dan UU 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup); (4) rendahnya kepedulian masyarakat pesisir terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan sekitarnya serta pola bangunan yang membelakangi pantai; (5) rendahnya pengetahuan masyarakat pantai tentang pengetahuan lingkungan.

Pencemaran perairan pantai dapat mengakibatkan (a) rendahnya daya dukung lingkungan dan kualitas perairan pesisir ; (b) menimbulkan bau yang tidak menyenangkan untuk daerah kunjungan wisata ; (c) meningkatnya wabah penyakit menular terhadap kehidupan masyarakat pesisir ; (d) menurunnya tingkat keberhasilan budidaya perikanan (tambak dan mariculture) dan kegiatan ekonomi lainnya (pariwisata). Ditambah lagi bahwa fasilitas sistem informasi sumberdaya pesisir dan laut sangat kurang sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah pantai dan laut tidak optimal dan tidak berkelanjutan.

Untuk memulihkan kondisi ekosistem yang sudah sangat rusak OXFAM bersama mitranya MAP mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran untuk memelihara mangrove yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pesisir. Salah satu solusi dalam menekan laju kerusakan ekosistem pesisir yaitu melalui upaya rehabilitasi ekosistem mangrove. Tampak bahwa keberadaan ekosistem mangrove sangat penting bagi produktivitas perikanan dan peningkatan sumber daya perairan secara umum.

Dalam mengakomodasi kebutuhan lahan dan lapangan pekerjaan, ekosistem mangrove dapat dikelola dengan model *silvofishery* atau wanamina yang dikaitkan dengan program rehabilitasi ekosistem pesisir. Kegiatan *silvofishery* berupa empang parit pada kawasan ekosistem mangrove telah dimulai sejak tahun 1978. Empang parit ini pada dasarnya adalah semacam tumpang sari pada hutan jati, ikan dan udang sebagai pengganti palawija (Wirjodarmodjo dan Hamzah 1984). Sejak tahun 1990 dibuat sistem pola terpisah (komplangan)

dengan 20% areal untuk budi daya ikan dan 80% areal untuk mangrove dengan pasang surut bebas.

Dari sistem *silvofishery* semacam ini, pemeliharaan bandeng dan udang dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 5.122.000/ha/tahun untuk 2 kali panen setiap tahun. Selanjutnya contoh pola *silvofishery* di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, pola komplangan menunjukkan perbandingan relatif lebih baik daripada pola empang parit, baik dalam hal produktivitas perairan maupun pertumbuhan mutlak, kelangsungan hidup maupun biomassa bandeng yang diperlihara pada masing-masing pola (Sumedi dan Mulyadhi 1996), kemudia selisih pertumbuhan mutlak 9,6 g, sedangkan biomasnya 7,1 kg/m³.

Selanjutnya apa yang dilakukan selama ini dalam program RCL adalah berupaya membangun kesadaran masyarakat dan pemerintah bahwa strategi kebijakan pemanfaatan potensi sumber daya ekosistem mangrove sangat menentukan arah dan tujuan perencanaan dan pengembangan pemanfaatn ekosistem mangrove secara terpadu dan keberlanjutan. Partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan untuk jangka panjang.

G. PERAN SOSIAL PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

Di pesisir peran perempuan tidak bisa diabaikan begitu saja, kerja-kerja yang dilakukan oleh perempuan tidak lebih ringan dari pada laki-laki. Bahkan sebenarnya tugas mereka jauh lebih berat dari pada laki-laki, dimana perempuan harus mengerjakan kerja-kerja reproduktif pada satu saat dan pada saat yang lain harus juga mengerjakan kerja-kerja produktif dan komunitas sekalian. Hal ini sangat berbeda dengan laki-laki dimana sebagian besar laki-laki di masyarakat kita hanya mengemban tugas dan kerja produktif dan komunitas saja.

Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa kerja reproduktif itu adalah kerja yang menjadi tanggung jawab perempuan saja. Laki-laki hanya berkewajiban mencari nafkah dan kerja-kerja lain di luar rumah, adapun perempuan tempatnya memang wajib mengurus yang

di dalam rumah.

Khusus untuk perempuan, nasib mereka lebih buruk dibandingkan dengan laki-laki atau suami mereka. Untuk *livelihood* sebagai penggarap dan buruh nelayan serta petambak, perempuan selalu diposisikan sebagai pekerja yang tidak dibayar karena dia hanya membantu suaminya. Sedangkan untuk pertanian rumput laut, perempuan bekerja sebagai buruh pembibitan, pengikatan rumput laut, pemanen, pengangkut, dan penjemur rumput laut yang kesemuanya dibayar murah. Sebagai contoh, untuk mengikat rumput laut, perempuan mendapat upah Rp 1,500 – 4,000 per 15 – 40 meter ikatan rumput laut.

Dalam bekerja, perempuan tidak jarang membawa anak-anak mereka. Di antara anak-anak itu, ada juga yang mulai terlibat untuk membantu ibu mereka bekerja, bagi ibu-ibu yang membawa anak-anak yang masih kecil tentu saja penghasilannya jauh lebih sedikit karena waktu mereka terbagi bekerja sambil menjaga anak tentunya sangat menyulitkan bagi perempuan.

Dalam suatu diskusi dengan kelompok perempuan dari desa dampingan program RCL, salah seorang peserta mengatakan setiap hari dia menghabiskan waktu untuk bekerja urusan rumah dan bekerja di luar rumah lebih kurang 17 jam. Ibu ini tidak merasa keberatan dengan jam kerja yang begitu banyak. Kuatnya budaya patriarki menyebabkan sulitnya menyadarkan laki-laki untuk shifting peran domestik perempuan kepada laki-laki dengan stereotipe peran publik. Perempuan pun masih melanggengkan pelabelan / stereotip ini sehingga menjadi merasa tidak berkeberatan. Selanjutnya dalam presentasi diskusi kelompok terbatas dia mengatakan lebih lanjut :

"Banyak perempuan di desa saya pada saat musim menanam pada bekerja sebagai pekerja upah di lahan orang lain, karena kami tidak punya lahan. Kami bekerja dari pagi hingga sore dan biasanya kami pulang sebentar untuk urus rumah kemudian kembali lagi. Begitu juga saat musim bertanam rumput laut, kami bertugas mengikat bibit-bibit rumput laut karena pekerjaan itu semua maka jumlah jam bekerja perempuan melebihi jumlah jam laki-laki. Perempuan di desa saya punya tanggung jawab untuk mengurus semua urusan rumah tangga dan biasanya laki-laki lebih banyak urus kerja-kerja di luar rumah kalau yang menanam bentangan ke laut maka laki-lakilah yang melakukan."

Jenis Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki pada masyarakat persisir

Jenis Livelihood	Jenis Pekerjaan dan yang Melakukannya	
	Laki-Laki	Perempuan
Nelayan pemodal (<i>punggawa</i>)	- Memelihara kapal dan alat tangkap ikan - Mengkoordinir kelompok buruh nelayan yang dipekerjakan (<i>sawi</i>) untuk menangkap ikan - Mengelola dan mengontrol keuangan hasil penjualan tangkapan ikan dari buruh nelayan	Untuk Desa Pajukukang, istri punggawa yang juga ikut berlayar bersama ke Kalimantan Selatan bertugas menyediakan makanan para buruh nelayan selama menangkap ikan di laut Kalimantan Selatan.
Buruh nelayan (<i>sawi</i>)	- Menyiapkan kapal - Melaut, menangkap ikan	Menyiapkan makanan selama melaut (jika diperlukan)
Nelayan tangkap	- Menyiapkan perahu - Melaut, menangkap ikan dengan cara menyelam	- Menyiapkan makanan untuk melaut - Menyiapkan alat tangkap ikan - Mensortir hasil ikan dan mengeringkan - Mencari kerang - Menjual hasil tangkapan (ikan) - Membuat dan memperbaiki jaring ikan
Nelayan Kepiting	- Menyiapkan perahu - Mencari kepiting	- Menyiapkan alat tangkap ikan - Membuat pukot kepiting
Buruh pengupas kulit kepiting		Mengupas kulit kepiting di perusahaan pengolahan kepiting
Budidaya Rumput Laut di laut dangkal	- Menyiapkan perahu - Menyiapkan pelampung - Mematok rumput laut di dasar laut - Memelihara rumput laut - Memanen rumput laut - Menjual hasil panen yang telah dijemur	- Menyiapkan bentangan - Membibit rumput laut - Menyiapkan pelampung - Mengikat rumput laut - Mengangkut hasil panen rumput laut - Menjemur rumput laut

Mencari rumput laut	Di salah satu desa di Pangkep suaminya bekerja menangkap kepiting tetapi sering jaring yang dipasang sangkut rumput laut dalam jumlah yang banyak karena hanyut dibawa air laut	Mencari rumput laut lepas selanjutnya mereka bertugas mengeringkan
Buruh mengikat rumput laut		Mengikat rumput laut dalam bentangan tali
Mencari benur bandeng/ Udang		Mencari benur (anak ikan) bandeng/udang. Saat ini semakin berkurang karena ada abrasi
Buruh Tambak	• Pembenihan ikan dan udang • Pemeliharaan tambak (menjaga kualitas air tambak) • Pemberian makan • Pemanenan	• Menyiapkan makanan untuk melaut • Mempersiapkan alat tangkap ikan • Perempuan mensortir hasil ikan/udang tambak
Pembuat arang dari kayu bakau, hanya ditemukan di Desa Maccini Baji	• Mengumpulkan kayu dari pohon bakau • Menjual arang kayu bakau	Sebagian besar proses pembuatan arang dilakukan oleh perempuan: • Memotong kayu; • Memukul kayu; Mengupas kayu; • Membakar kayu menjadi arang.

Memperhatikan tabel di atas , terlihat jelas bahwa jenis-jenis pekerjaan untuk perempuan yang mendapatkan penghasilan adalah pekerjaan harian yang didapat dari pemodal (sebagai buruh harian yang dibayar murah) atau yang langsung memanfaatkan sumberdaya alam pesisir (mencari kerang, rumput laut, dan benur ikan/udang).

Pekerjaan harian seperti ini sangat tidak memberikan kepastian untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang memadai. Pada masyarakat pesisir bila dilihat secara teliti bahwa beragam *livelihood* berbasis sumberdaya alam pesisir tersebut dikuasai oleh laki-laki. Posisi dan peran para perempuan, walaupun banyak menghabiskan waktu untuk mengurus

kerja-kerja reproduktif dan produktif namun hanya bersifat membantu, tidak diperhitungkan upahnya, dan tidak diakui nilai ekonomisnya.

Waktu yang banyak dihabiskan oleh perempuan bekerja di luar rumah tidak menjamin bahwa mereka akan mendapatkan hasil yang banyak pula (uang) karena mereka hanya menguasai sangat kecil dari sumber daya yang tersedia di pesisir.

Mendorong peran perempuan dalam berbagai sektor akan memberikan dampak kepada berhasilnya pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam RCL program ini mendorong keterlibatan aktif dari kelompok perempuan dalam bidang ekonomi. Pembangunan manusia berkualitas bukan hanya menyangkut aspek ekonominya saja tetapi juga di sisi lain, seperti pendidikan. Memberikan pendidikan membaca dan menulis yang dilakukan di desa sejak tahun 2011 adalah salah satu pintu masuk untuk mengajak perempuan untuk berdiskusi lebih banyak tentang persoalan yang mereka hadapi. Diskusi-diskusi ini pada akhirnya mampu mengajak perempuan untuk mencermati lebih dalam apa yang bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk keluar dari persoalan yang dihadapi.

Perlu mendorong laki-laki untuk terlibat dan tahu masalah perempuan. Selama ini dominasi laki-laki sangat jelas terlihat atau mencolok. Program RCL yang bertujuan untuk memperkuat kelompok yang kurang beruntung melalui peningkatan kapasitas masyarakat sering juga mendapatkan hambatan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan karena model-model pemberdayaan yang dikembangkan oleh pemerintah dan LSM sangat berbeda.

Dalam program RCL yang didorong adalah partisipasi aktif masyarakat. OXFAM sangat percaya bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki nasibnya serta dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang mendorong negara memenuhi kewajiban dalam pemenuhan hak-hak masyarakat.

Untuk meningkatkan peran gender OXFAM mengembangkan strategi

- Memastikan bahwa yang perempuan dan laki-laki terlibat aktif dalam proses-proses pembuatan kebijakan
- Memastikan bahwa perempuan mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya
- Memastikan kelompok lain yang kurang beruntung (kelompok miskin terutama perempuan, kelompok buta huruf, kelompok yang berkebutuhan khusus) terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan
- Meningkatkan kemampuan/kapasitas masyarakat, pemerintahan desa, pendamping masyarakat, kelompok perempuan, LSM Lokal (pendamping/mitra) hingga pemerintah Kabupaten
- Meningkatkan kapasitas masyarakat agar memiliki kemampuan untuk memediasi persoalan-persoalan sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat
- Meningkatkan kemampuan laki laki dan perempuan untuk memantau dan mengontrol jalannya pembangunan
- Menginisiasi dan memfasilitasi dialog yang berguna antara berbagai kelompok kepentingan di komunitas serta antara kelompok masyarakat dengan pengambil kebijakan

Mendorong peran gender dalam masyarakat kita bukanlah pekerjaan mudah, selama ini dalam proses pembangunan tidak semua orang dilibatkan (terutama perempuan, sangat jarang ada didalamnya). Pihak yang sering terlibat biasanya adalah kelompok elit sosial yang ada di desa, kaya, laki-laki dan kelompok berwenang lainnya. Dalam pertemuan-pertemuan yang sering difasilitasi OXFAM, masyarakat sering mengeluhkan bahwa hanya sebahagian kecil diantara mereka yang memahami alur dan proses pengambil keputusan yang ada ditingkat desa.

Program RCL telah sangat mendorong partisipasi perempuan. Hal ini menjadi prioritas karena selama ini perhatian terhadap perempuan belum sepenuhnya menjadi terakomodir kepada pengambil kebijakan.

Ciri-ciri dan syarat-syarat partisipasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan;

- Perwakilan dari semua pihak, kelompok sosial, laki-laki dan perempuan secara demokratik
- Kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk mengambil peran/terlibat dalam sistem perencanaan, pelaksanaan kegiatan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan
- Semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan hingga akhirnya (moneva) dengan memperhatikan dampak kegiatan yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat
- Semua pihak mempunyai waktu, sumberdaya, ketrampilan, kekuasaan dalam pengambilan keputusan, dan lain sebagainya agar bisa terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan
- Semua pihak menyumbang gagasan, materil, finansial sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing
- Komunikasi yang sehat terbangun pada setiap aktor sehingga setiap orang bisa bebas mengemukakan ide atau gagasannya
- Semua pihak bertanggungjawab atas semua keputusan yang dibuat dan dijalankan
- Fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksana rencana
- Pihak-pihak yang terlibat saling menghargai ide atau gagasan dari pihak lain
- Setiap orang punya hak untuk menyarankan perubahan-perubahan
- Setiap orang memiliki hak dan tanggungjawab yang setara

Kepekaan gender (gender sensitivity) dalam program RCL diberikan kepada perempuan dan laki-laki karena dalam proyek ini kelompok-kelompok masyarakat ini akan menegosiasikan kebutuhan dan mempertemukan ide atau gagasan serta membuat prioritas program yang akan dilakukan. Perempuan dan laki-laki diajak untuk mendiskusikan bagaimana melihat kebutuhan strategis bagi perempuan dan laki-laki yang akan memberikan dampak dan manfaat kepada rumah tangga. Selama ini pandangan masyarakat (baca

laki-laki) cenderung mengabaikan kebutuhan strategis perempuan yang didefinisikan sebagai kebutuhan perempuan hanya melulu dan berputar-putar pada urusan domestik saja. Misalnya saja bila ada kegiatan dilakukan di desa maka perempuan hanya kebagian urusan konsumsi (mulai dari memilih menu, memasak, menyajikan, mengatur peruntukan porsi makanan dan sebagainya), substansi pertemuan hanya menjadi fokus kelompok laki-laki. Perempuan pada akhirnya tidak sangat terbiasa untuk berbagi pengalaman, pengetahuan atau ketrampilannya di depan umum, bukan karena kapasitas mereka rendah tetapi di masyarakat patriarki perempuan berada posisi yang dianggap tidak penting.

Untuk menciptakan peran-peran yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui program ini didorong agar perempuan dan laki-laki keduanya diikutkan dalam pelatihan kepemimpinan dan pengembangan organisasi kelompok, metode 'sharing' dan diskusi kelompok yang digunakan dalam pelatihan menjadi instrumen yang sangat efektif dalam menyampaikan semua materi. Diawali dengan mempromosikan hak-hak perempuan dalam program RCL, peserta mendapatkan pemahaman mendasar tentang pentingnya keterlibatan perempuan serta hal-hal lain yang harus dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif perempuan. Kemudian, dipaparkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan. Dalam hal mengorganisir sebuah kelompok masyarakat, para peserta dikenalkan dengan pengetahuan organisasi yang baik dan karakter serta peran kepemimpinan demi kemajuan dan perkembangan organisasi. Untuk mewujudkan semua itu, maka peserta juga dilatih untuk merancang sebuah rencana kerja kelompok yang kelak berguna untuk kelangsungan kegiatan kelompok masyarakat itu sendiri.

H. MEMPERKUAT ORGANISASI MASYARAKAT PESISIR

Di pesisir Pangkep, perempuan terlibat dalam aktivitas pertanian dengan menjadi buruh tani, beternak, dan budidaya rumput laut. Bahkan akses perempuan dalam sumberdaya pesisir tersedia melalui kegiatan jasa pembuatan dan perbaikan jaring (*massire*), dan mengupas mete. Untuk kegiatan terkait mete, terdapat lebih 10 kelompok (5-30 perempuan per kelompok), yang menjadi penghubung

perusahaan pemasok bahan mete yang akan dikupas. Upah yang didapatkan berdasar pada berapa banyak mete yang telah dikupas. Minimal ditetapkan sebesar Rp 2.500/kg. Rata-rata perempuan yang bekerja hanya bisa menyelesaikan maksimal 4 kg dengan waktu kerja selama 10 jam/hari.

Perempuan di kabupaten Barru mengakses lahan pertanian dengan menjadi buruh tani pada musim panen atau berkebun jagung sekaligus menjadi penjual jagung. Ada pula kegiatan *mattaiseng*—memelihara ternak unggas dan sapi. Si pemelihara memberikan makanan pada ternak peliharaan. Setiap anak pertama dari induk piaraan menjadi milik sang pemelihara. Begitu pula dengan kerugian karena hilang atau mati, si pemelihara yang bertanggung jawab. Mereka juga terlibat dalam budidaya rumput laut untuk membantu suami mereka. Bantuan itu meliputi penyiapan bibit, mengikat, dan menjemur rumput laut. Sebagian kecil bekerja sebagai penjual keripik, penjahit *lamming* (ornamen penghias acara perkawinan).

Sedang perempuan Takalar memanfaatkan sumberdaya laut langsung dengan terlibat dalam proses pembudidayaan rumput laut, mengikat rumput laut, memasang bentangan, memanen, dan menjemur hasil panen. Mereka pun mengakses hutan mangrove dan mengambil kerang-kerangan di substrat hutan mangrove. Di kawasan ini pula mereka mengambil kayu bakau, mengupas, menjemur, hingga menjual atau memanfaatkannya sebagai kayu bakar. Kerajinan dari bahan tanaman pesisir seperti daun pandan duri mereka jadikan tikar dan daun kelapa sebagai bahan baku atap rumah. Selain itu, kalangan perempuan pun berkebun menanam jagung, sayuran, dan buah-buahan.

Dalam menjalankan kerja-kerja pendampingan di lapangan OXFAM memberikan penguatan kepada kelompok-kelompok yang terbentuk di masyarakat. Awalnya tentu saja kelompok sangat kesulitan untuk mengembangkan arah dan tujuannya, karena selama ini memang masyarakat belum terbiasa untuk bekerja sama dalam sebuah organisasi yang teratur dengan baik. Banyak konflik diantara mereka yang mulai timbul, terkadang ketua tidak tahu apa yang menjadi tugasnya, bendahara kebingungan karena harus melakukan pencatatan keuangan, sekretaris yang tidak pernah tahu jumlah anggotanya berapa orang dan seterusnya. Kebingungan juga terjadi

dengan anggota kelompok, karena mereka berpikir tidak perlu repot-repot untuk hadir dalam pertemuan cukup diwakilkan saja dengan anggota lainnya.

Penguatan organisasi/kelompok di masyarakat ini penting dilakukan untuk menjamin keberlanjutan di masa yang akan datang. Banyak contoh yang membuktikan begitu banyaknya bantuan yang selama ini diberikan namun kalau masyarakatnya tidak kuat maka semua apa yang telah dilakukan akan sia-sia. Tidak akan ada yang tertinggal sedikitpun di masyarakat karena tidak ada keinginan untuk mengembangkannya lebih lanjut dan bisa dirasakan hasilnya lebih besar lagi bagi masyarakat luas (diluar kelompok). Masyarakat yang aktif dan kritis adalah masyarakat yang bisa memaksimalkan pemanfaatan dari bantuan/intervensi yang selama ini telah diterima. Kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki hari ini agar menjadi lebih besar dan kekritisannya masyarakat terlihat apabila mereka mampu memberikan masukan kepada perencana atau pembuat kebijakan agar semua intervensi yang akan dilakukan kedepannya harus mengurangi kerentanan masyarakat khususnya perempuan.

Kemajuan kelompok yang telah didampingi yang didapat dilihat dan dirasakan adalah bahwa mereka sudah memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap proses perencanaan dan kebijakan yang ada di desa. Dimana selama ini kepekaan mereka sangat rendah yang berakibat ujung-ujungnya kelompok tidak peduli untuk mengelola dengan baik, namun kini mereka sangat aktif menyebar luaskan ketrampilan dan pengetahuan yang mereka miliki. Selanjutnya dalam pertemuan-pertemuan rutin kelompok mereka juga mendiskusikan aset-aset yang ada di desa untuk dikelola menjadi lebih baik. Kelompok perempuan juga mengalami kemajuan mereka mengusulkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasa penting oleh perempuan. Keterlibatan perempuan bukan hanya sebagai syarat yang ditetapkan dalam pengambilan keputusan, namun lebih dari itu mereka mampu menyuarakan masalah yang melilit masyarakat di desanya. Nursiah salah seorang perempuan yang giat dan aktif di kelompok dan di desa, beliau mengatakan penting sekali perempuan untuk hadir dalam pertemuan musyawarah desa. Kehadiran perempuan selama 2 hingga 3 jam itu penting sekali untuk menentukan masa depan perempuan yang ada di desa. Biasanya jarang sekali pemerintah desa dan teman laki-laki yang datang sebagai utusan dari desa

untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Bisa dibayangkan seandainya perempuan tidak berada pada saat diskusi perencanaan itu terjadi maka tidak akan ada usulan terkait dengan kepentingan perempuan itu sendiri. Tidak hanya sebatas usulan bahkan menurut Ibu Nursiah usulan itu harus di kawal hingga ke Kabupaten karena bisa saja usulan itu akan hilang di tengah jalan. Ketika perempuan sudah mengusulkan tidak bisa berhenti hingga disitu tapi harus di kawal terus menerus karena banyak pihak merasa tidak penting buat mereka dibandingkan dengan usulan infra struktur lainnya.

Diskusi reguler dalam kelompok para peserta menyampaikan beberapa program atau kegiatan yang sangat mungkin dapat dikembangkan oleh kelompok. Isu pembangunan desa dinilai sangat penting untuk diperhatikan oleh masyarakat dengan memperhatikan perpektif gender dalam isu pembangunan.

I. MENDORONG KESETARAAN DAN Keadilan Gender

Sering kita dengar hingga hari ini kalau bicara tentang gender selalu dilekatkan dengan perempuan, seolah-olah bila bicara gender itu hanya terkait tentang persoalan-persoalan yang disekitar perempuan. Selama ini peluang dan kesempatan tidak diberikan secara berimbang bagi perempuan, kecenderungannya bahwa laki-laki mendapatkan keistimewaan untuk menikmati hak-haknya sehingga perempuan berada pada posisi yang jauh tertinggal di belakang.

Dalam penelitian yang baru-baru ini dilakukan oleh OXFAM terlihat jelas bahwa masih banyak nilai-nilai adat yang hidup di tengah di masyarakat membatasi perempuan untuk terus berkiprah. Perlu waktu panjang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar mereka mampu melakukan banyak aktifitasnya di ranah publik atau komunitas.

“...sejak kedatangan OXFAM kami bapak-bapak dan ibu-ibu senang sekali karena kini ibu-ibu punya kegiatan, sebelumnya mereka hanya berkumpul dan kemudian bergosip atau menggunjingkan orang yang terkadang buat jadi tambah masalah saja...”

Komentar seperti yang dikutip diatas sangat sering didengar

ketika melakukan diskusi-diskusi dengan kelompok terbatas di masyarakat. Pekerjaan domestik perempuan sangat kurang dihargai seolah-olah terlihat bahwa perempuan tidak ada kerjaan sehingga perlu dibuat kegiatan agar mereka bisa memanfaatkan waktu dan tidak menghabiskannya untuk bergunjing. Sejatinya perempuan menghabiskan banyak waktu setiap hari untuk melakukan pekerjaan rumah tangganya namun di masyarakat kita jenis pekerjaan ini memang tidak mendapatkan apresiasi.

Pada umumnya masyarakat mendefinisikan “pekerjaan” manakala ada keuntungan berupa materi yang didapatkan setelah melakukan pekerjaan. Padahal bisa kita bayangkan jika saja setiap perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangganya harus dibayar maka berapa gaji yang harus mereka terima setiap bulannya.

Bagaimana mungkin perempuan bisa terlibat dalam masyarakat atau pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten? Selama ini perempuanlah yang selalu dipersalahkan karena partisipasi mereka sangat kurang dalam pengambilan keputusan. Pandangan atau komentar seperti ini sebenarnya yang selalu memojokkan perempuan seolah-olah dengan diundang perempuan bisa bebas datang dan menyuarakan kepentingannya selama ini. Tidak adil tentunya buat perempuan karena banyak kondisi-kondisi yang sangat membatasi ruang gerak perempuan, misalnya saja bagaimana dia bisa terlibat dan hadir karena tugas kerumah tanggaan yang harus dikerjakan sangat menumpuk.

Untuk keluar dari rumah saja banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh perempuan belum lagi ketika suami tidak mengizinkan itu juga menjadi kendala tersendiri. Waktu 18 jam yang dihabiskan untuk mengurus rumah tangga bahkan nyaris waktu istirahatpun terpakai kalau begini ceritakan bagaimana mungkin perempuan bisa mendapatkan akses informasi dan meningkatkan kapasitasnya.

Minimnya waktu yang dimiliki perempuan untuk menikmati hak-haknya tentu saja berdampak kepada rendahnya tingkat partisipasi, rendahnya akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya dan keputusan. Peluang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki titik awal agar kedua-duanya bisa sama-sama menjadi

pelaku pembangunan, hadir di dalam pertemuan desa tidak cukup untuk mengatakan bahwa perempuan telah berpartisipasi mungkin dari segi kehadiran tetapi tidak dari segi kualitas.

RCL memajukan perempuan dengan dibarengi upaya mendorong perubahan kebijakan yang perspektif gender serta sikap untuk menghargai hak hak perempuan. Laki-laki mendorong agar perempuan mampu menunjukkan potensi dirinya, dengan cara misalnya dalam rumah tangga bagaimana laki-laki atau suami memberikan kesempatan yang sama untuk anak perempuan mengeyam pendidikan. Tidak membedakan anak perempuan dan anak laki-laki dalam segala hal agar keduanya memiliki kemampuan dan derajat kepintaran yang sama. Yang penting juga adalah bahwa mendidik anak adalah tugas dan tanggung jawab suami istri, tidak bisa dibebankan hanya kepada istri saja atau suami saja begitu juga dalam menangani pekerjaan rumah tangga bahwa semua itu harus dikerjakan bersama-sama.

Bila melihat kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2008 – 2013 diarahkan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat yang diwujudkan dalam beberapa program aksi sebagai berikut :

1. Peningkatan kesempatan bagi kaum perempuan untuk menikmati pendidikan di semua jenjang, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang tinggi menuju terciptanya kesetaraan dan keadilan gender
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan reproduksi termasuk dalam keluarga berencana
3. Peningkatan akses kaum perempuan untuk di bidang ekonomi produktif termasuk mendapatkan modal pelatihan usaha, program perluasan kesempatan kerja dan informasi pasar sehingga dapat mendorong lahirnya kemandirian perempuan dalam berwirausaha

4. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, sehingga tercipta keseimbangan perempuan diberbagai sektor
5. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak guna mencegah terjadinya diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan bahkan tindak perdagangan perempuan dan anak (trafficking) yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dan keseimbangan.

Untuk merealisasikan kelima poin diatas maka perlu semua komponen masyarakat dan pemerintah terlibat baik perempuan maupun laki-laki. Oxfam mendorong agar laki-laki juga harus memahami apa-apa yang menjadi garis kebijakan pemerintah yang mengatur segala urusan terkait pendidikan, hak politik, kesehatan reproduksi, budaya, ekonomi dan lain sebagainya agar bisa diakses oleh perempuan.

Dalam kehidupan sehari-hari juga banyak ditemukan nilai adat yang terkadang masih memposisikan perempuan pada lingkup domestik saja, dimana mereka diharapkan harus mampu mengurus hal-hal kerumah tanggaa sedangkan laki-laki pada pihak yang superior. Hasil penelitian terkait hak-hak perempuan didapati bahwa ada beberapa konsep menjadi seorang perempuan dan laki-laki yang tertuang dalam petuah Bugis:

- “ Hai perempuan, pagari dirimu demi kehormatanmu, hai pria pagari dirimu demi kesabaranmu.” Pesan tersebut menyiratkan tentang anjuran bagi perempuan untuk senantiasa menjaga kehormatannya. Kehormatan yang dimaksud tertuang dalam konsep siri’ yang berarti rasa malu. Dalam hal ini, orang yang tidak memiliki rasa malu atau mengabaikan kehormatannya, akan dianggap sebagai orang yang tidak bermartabat. Lebih jelasnya, orang yang dianggap tidak memiliki harga diri atau siri’ jika telah melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau tidak terhormat.
- “ Jangan pernah duduk bersama (berdua-duaan) laki-laki dan perempuan, karena sifat berdua-duaan itu rawan dirasuki setan yang jahat.” (Lontara Luwu’). Pada petuah tersebut, ditekankan kepada perempuan dan laki-laki Bugis untuk berdua-duaan demi

menghindari perbuatan maksiat. Petuah tersebut merupakan salah satu petuah yang mendapat pengaruh dari akulturasi ajaran Islam. Selain sebagai sebuah penekanan sikap, petuah tersebut juga ditekankan untuk menghindari fitnah yang akan mencemari nama baik keluarga dalam masyarakat Bugis.

- Riappemmalianggi ana' daraE makkelong ri dapurenge narekko mannasui. Terjemahan: Pantangan bagi seorang gadis menyanyi di dapur apabila sedang memasak atau menyiapkan makanan. Masyarakat Bugis menjadikan pantangan menyanyi pada saat sedang memasak bagi seorang gadis. Akibat yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran terhadap larangan ini adalah kemungkinan sang gadis akan mendapatkan jodoh yang sudah tua. Secara logika, tidak ada hubungan secara langsung antara menyanyi di dapur dengan jodoh seseorang. Memasak merupakan aktivitas manusia, sedangkan jodoh merupakan faktor nasib, takdir, dan kehendak Tuhan. Jika dimaknai lebih lanjut, pemmali di atas sebenarnya memiliki hubungan erat dengan masalah kesehatan. Menyanyi di dapur dapat mengakibatkan keluarnya ludah kemudian terpercik ke makanan. Dengan demikian perilaku menyanyi pada saat memasak dapat mendatangkan penyakit. Namun, ungkapan atau larangan yang bernilai bagi kesehatan ini tidak dilakukan secara langsung, melainkan diungkapkan dalam bentuk pemmali.
- Deq nawedding anaq daraE matinro lettu tengga esso nasabaq labewi dalleqna. Terjemahan: Gadis tidak boleh tidur sampai tengah hari sebab rezeki akan berlalu bangun tengah hari melambangkan sikap malas. Apabila dikakukan oleh gadis, hal ini dianggap sangat tidak baik. Jika seseorang terlambat bangun, maka pekerjaannya akan terbelangkalai sehingga rezeki yang bisa diperoleh lewat begitu saja. Terlambat bangun bagi gadis juga dihubungkan dengan kemungkinan mendapatkan jodoh. Karena dianggap malas, lelaki bujangan tidak akan memilih gadis seperti ini menjadi istri. Jodoh ini merupakan salah satu rezeki yang melayang karena terlambat bangun. Dari tinjauan kesehatan, bangun tengah hari dapat mengakibatkan kondisi fisik menjadi lemah. Kondisi yang lemah menyebabkan perempuan (gadis) tidak dapat beraktivitas menyelesaikan kebutuhan rumah tangga. Masyarakat Bugis menempatkan perempuan sebagai pemegang

kunci dalam mengurus rumah tangga. Perempuan memiliki jangkauan tugas yang luas, misalnya mengurus kebutuhan suami dan anak.

- Pemmali mattula bangi tauwe nasabaq macilakai Pantangan bertopang dagu sebab akan sial. Bertopang dagu menunjukkan sikap seseorang yang tidak melakukan sesuatu. Pekerjaannya hanya berpangku tangan. Perbuatan ini mencerminkan sikap malas. Tidak ada hasil yang bisa didapatkan karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Orang yang demikian biasanya hidup menderita. Ia dianggap sial karena tidak mampu melakukan pekerjaan yang mendatangkan hasil untuk memenuhi kebutuhannya. Ketidakmampuan tersebut mengakibatkan hidupnya menderita.

Petuah-petuah Bugis yang hidup hingga kini ikut mewarnai peran, tingkah laku, sikap dan tugas seorang perempuan di tengah keluarga dan masyarakatnya. Tentunya ini juga melatar belakangi pada proses selanjutnya kiprah masing-masing perempuan dan laki-laki mewarnai kehidupan mereka.

4

**BELAJAR DARI
TEORI KE PRAKTEK:
MENGHAPUSKAN
KETIDAKADILAN BAGI
PEREMPUAN**

Bagi masyarakat tradisional "*patriarki*" di pandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat dan kekuasaan adikodrat yang tidak terbantahkan. Kepercayaan kepada Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan sehingga perbedaan dalam kehidupan manusia pun diatur berdasarkan perbedaan tersebut. Tambah lagi faktor agama telah memperkuat kedudukan kaum laki-laki. determinasi biologis telah memperkuat pandangan tersebut artinya karena secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dengan masyarakatpun diciptakan berbeda. Laki-laki selalau dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan yang berkodrat melahirkan ada di dalam rumah, mengerjakan urusan domestik saja. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak, laki-laki bertugas mencari nafkah dan perbedaan tersebut dipandang sebagai hal yang alamiah. Itu sebabnya ketimpangan yang melahirkan subordinasi perempuanpun dipandang sebagai hal yang alamiah pula. Hal tersebut bukan saja terjadi dalam keluarga tetapi telah melebar ke dalam kehidupan masyarakat¹.

Belajar dari apa yang telah dilakukan oleh OXFAM selama 4 (empat) tahun belakangan ini melalui program RCL bahwa penting sekali mendorong pemajuan perempuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik bidang lainnya. Kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mengakomodir kepentingan perempuan, coba perhatikan saja program KB yang pada umumnya lebih banyak mensasar perempuan sebagai akseptornya, selalu yang disuruh berKB adalah perempuan sedangkan laki-laki sangat jarang sekali mau terlibat untuk urusan yang satu ini. Banyak perempuan juga pada akhirnya mengalami masalah hormonal karena berKB, beberapa orang perempuan mengatakan tidak mengalami menstruasi kalau menggunakan suntik KB. Ada lagi yang lain dimana dampaknya perempuan mengalami kegemukan setelah berKB serta mendapatkan keputihan karena menggunakan spiral.

Begitu juga dengan beberapa program penguatan ekonomi yang dilakukan selama ini juga hanya sebatas memberikan bantuan peralatan mesin jahit, alat-alat pembuatan kue, alat memasak dan bantuan modal usaha disangkakan bisa merubah

¹ <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/PemberdayaanPerempuan>

situasi perempuan yang selama ini sangat tertinggal dalam proses pembangunan. Bila dilihat kenyataannya sebenarnya di lapangan bantuan tersebut tidaklah semata-mata bisa merubah keadaan perempuan saat ini. Intervensi harus dilakukan oleh pemerintah atau organisasi lain seperti OXFAM untuk memberikan pendidikan kritis agar perempuan mampu melihat jauh ke depan di luar dirinya sendiri dan lingkungannya. Oxfam mendorong agar masyarakat mampu memetakan persoalan perempuan yang menghambat perempuan untuk maju dan berkembang pada hari ini. Rendahnya tingkat pendidikan, kebijakan yang tidak pro perempuan, anggaran yang memperhatikan pembangunan fisik saja dan sering tidak memperdulikan pembangunan manusianya (terkhusus perempuan), kesehatan perempuan yang rendah, angkat kematian ibu yang tinggi, banyak perempuan yang tidak terampil (unskilled) dan lain sebagainya. Untuk mengejar kesenjangan yang sangat mencolok itu maka perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan diri perempuan secara masif (massive), pendekatannya harus menyeluruh serta melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah.

Islam juga mengajarkan hal yang sama kepada kita manusia, ajaran Islam yang asasi adalah adanya kesetaraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaan (Q.S. al-Nisa' (4) : 1; al- Rum (30): 21) : manusia setara di hadapan ALLAH, kemudian manusia bukan karena jenis kelamin, melainkan karena ketakwaan dan amal salehnya (Q.S. al-Hujurat (49): 13; al-Nahl (16): 97); manusia setara dalam beriman, beribadah dan melakukan perbuatan moral (Q.S. al-Tawbah (9): 71); manusia juga setara dalam menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri, sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga kesucian dan kehormatan diri (Q.S. al-Nur (24); 30 – 31; al-Ahzab (33); 35). Kesemua ayat ini memberi kita panduan untuk berlaku adil dan setara dalam hubungan antar manusia².

Ayat-ayat diatas menjelaskan tentang kedudukan seorang perempuan dan laki-laki, dimana keduanya setara dimata sang Khaliq, namun kemudian manusia yang didunia ini membuatnya jadi berbeda. Ketika sang Khaliq memberikan hak yang setara kepada perempuan dan laki-laki seharusnya keduanya bisa menikmati hak-

2 Komnas Perempuan, Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan, Maret 2009, hlm 35

hak sebagai makhluk dimuka bumi ini. Akibat perbedaan yang dibuat oleh manusia akibatnya perempuan mengalami ketidakadilannya ; kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi, subordinasi, marjinalisasi, subordinasi dan double burden (beban ganda). Program yang jalankan oleh OXFAM bersama mitranya bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut baik pada level rumah tangga, masyarakat dan negara.

Beberapa masalah berikut yang melemahkan partisipasi perempuan³

Internal	Eksternal
Rendahnya kualitas perempuan dan peran perempuan karena rutinitas keluarga terkait dengan beban ganda yang dialami perempuan, sehingga waktu tersisa hanya untuk mengurus rumah tangga	Sistem diskriminatif karena kepemimpinan oleh mayoritas laki-laki dan walaupun perempuan dilibatkan hanya di bagian konsumsi
Keterbatasan ekonomi dan waktu karena tidak ada waktu untuk mencari nafkah tambahan dan ikut dalam proses penyusunan APBD	Tidak adanya kesempatan bicara, di mana perempuan yang diberi kesempatan bicara hanya unsur dari PKK, sementara unsur lain tidak pernah dimintai pendapat
Kemampuan/keterampilan perempuan terbatas dan kurang karena perempuan merasa tidak mampu mengikuti proses dan khawatir ditertawakan peserta lain	Waktu pelaksanaan tidak ramah terhadap perempuan. Dimulai pagi jam 8, sehingga perempuan tidak bisa datang karena sibuk mengurus keluarga
Tingkat kepedulian perempuan rendah karena dianggapnya APBD bukan urusannya, sehingga tidak ada ketertarikan untuk terlibat	Representasi perempuan tidak mewakili, karena perempuan partisipasinya minim, hanya sedikit perempuan yang bisa terlibat dalam perencanaan dan penganggaran, yakni perempuan tertentu saja, sehingga kelompok perempuan yang termarginalkan tidak akan pernah teraspirasikan kebutuhan dan kepentingannya karena peluang untuk bersuara sama sekali tidak ada
Miskin informasi penyelenggaraan kebijakan karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah	

3 Lembaga Pemberdayaan perempuan, APBD Bone Untuk Siapa? Juli 2008, hlm 50

Pada pola ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki menjadi penyebab dari beberapa poin penting yang telah disebutkan diatas. Pola-pola seperti inilah yang dibangun secara turun temurun dari dulu hingga kini, sehingga perempuan sangat kesulitan untuk bergerak dan mengaktualisasikan dirinya. Perempuan tidak bebas melakukan pilihan-pilihan hidupnya.

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan ketertinggalan perempuan ⁴;

1. Budaya yang masih mengedepankan dan mengutamakan laki-laki ketimbang perempuan
2. Rendahnya kapasitas perempuan memunculkan persoalan yang semakin rumit karena ketidakmampuan perempuan untuk bersaing dengan lawan jenisnya, sehingga kultur harus dibangun baik di tengah keluarga, masyarakat maupun pemerintah adalah bagaimana menghilangkan kebiasaan [apa?] yang masih ada di lingkungan masyarakat.
3. Sistem yang diskriminatif, yakni adanya kebijakan di daerah yang menjadikan perempuan semakin tertinggal. Hasil riset menunjukkan bahwa dalam hal apapun perempuan selalu dinilai kurang.
4. Peraturan yang diskriminatif, artinya tidak ada aturan yang jelas yang memberikan ruang khusus bagi perempuan untuk terlibat dalam proses kegiatan publik. Diperparah lagi kesempatan yang diberikan kepada perempuan sangat minim.
5. Konteks pengaruh budaya dalam realitas pengambilan kebijakan

Budaya yang tidak adil gender ini berusaha diubah di masyarakat walau mungkin tidak bisa serta merta, perlu proses panjang untuk mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Pada intervensi selama lebih 4 tahun ini, OXFAM mendorong agar akses, kontrol, manfaat dan dampak program bisa dirasakan baik oleh perempuan maupun laki-laki.

Terkait dengan dengan pemulihan ekonomi yang di lakukan melalui program RCL dalam ajaran Islampun telah disinggung bahwa Syariah Islam mempersamakan antara perempuan dan laki-laki

⁴ *Ibid*

untuk memanfaatkan dan menggunakan hak miliknya. Seperti dalam masalah jual beli, hibah, wasiat, sewa menyewa, serta muamalah lainnya. Perempuan dan laki-laki sama-sama berhak atas usaha yang dilakukannya. Hal ini tercermin dalam Q.S Al-Nisa' (4) : 32 : *"... bagi laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuanpun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan..."* ayat tersebut menunjukkan hak mutlak atas kepemilikan masing-masing individu, laki-laki maupun perempuan.

Seorang perempuan memiliki hak penuh untuk mengelola hartanya serta mencari dan mendapatkan harta baik dari hasil usaha maupun dari pemberian dan harta warisan. Sebagaimana laki-laki perempuan juga mendapatkan harta warisan dari orang tua atau kerabatnya.⁵

Konvensi Perempuan secara konkrit menekankan :⁶ Kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki (gender equality dan equity). Persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan adil disegala bidang dalam semua kegiatan meskipun diakui adanya perbedaan :

- a). Perbedaan biologi atau kodrati antara perempuan dan laki-laki
- b). Perbedaan perlakuan terhadap perempuan berdasarkan gender dengan akibat dimana perempuan dirugikan:
 - Perempuan sebagai subordinasi laki-laki dalam keluarga maupun masyarakat
 - Pembatasan kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang ada tumbuh berkembang secara optimal, menyeluruh dan terpadu. Peluang untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan
- c). Perbedaan kondisi dan posisi perempuan terhadap laki-laki dimana perempuan berada dalam kondisi dan posisi yang lemah karena sejak semula sudah dipolakan adanya diskriminasi dalam budaya adat atau karena lingkungan, keluarga, masyarakat yang tidak mendukung adanya kesetaraan dan kemandirian perempuan
- d). Prinsip dasar dari Konvensi Perempuan yang kita buat yaitu :
 - Prinsip persamaan substantif
 - Prinsip non diskriminasi
 - Prinsip kewajiban negara

5 Komnas Perempuan, Op cit, hlm 42

6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)

PENUTUP

Pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan harus disikapi dengan sangat terencana, karena pembangunan tanpa disertai dengan perencanaan yang konkrit dan melibatkan banyak pihak justru akan berdampak memiskinkan masyarakat itu sendiri. Disamping itu juga kerusakan ekosistem berkontribusi kepada menurunnya kemampuan masyarakat, yang meliputi pengetahuan, alat produksi, keterampilan, dan kesadaran akan pengembangan diri mempengaruhi peran mereka dalam pengelolaan sumberdaya alam. Dan kalangan perempuanlah menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari kerusakan tadi.

Peran tokoh adat dan tokoh masyarakat penting untuk direvitalisasi, para tokoh dikenal dengan penjaga adat istiadat dan kesepakatan/konsensus, aturan yang melengkapi dan menunjang aturan-aturan formal dari negara, dalam hal ini pemerintah desa. Hal ini sangat penting dalam kaitannya menyelesaikan masalah yang kerap tidak dapat ditangani oleh pemerintah.

Untuk membangun relasi sosial yang setara diantara anggota masyarakat, OXFAM melalui RCL program terus mendorong semua komponen untuk memperhatikan kepentingan masyarakat rentan serta mempromosikan keadilan gender dimana perempuan dan laki-laki memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, politik (baca : bukan semata-mata berpolitik praktis tetapi kekuatan untuk menentukan pilihan hidupnya/bersuara) dan lingkungan. untuk membangun kesadaran ini harus dilakukan dengan banyak cara misalnya saja dengan publikasi isu-isu kesetaraan gender serta memanfaatkan sumber-sumber informasi sosial, ekonomi, dan kerentanan lingkungan lewat kader kesehatan, penyuluh, dan kalangan fasilitator atau pendamping dari lembaga swadaya masyarakat.

[illegible]

[illegible]

